SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

KODE KLASIFIKASI ARSIP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi kearsipan, perlu adanya kode klasifikasi arsip;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Klasifikasi Arsip;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaraan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggati Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 969);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 154);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Rembang.

4. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.

5. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh instansi vertikal, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

6. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan Arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi Kearsipan.

7. Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas Arsip.

8. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip dinamis.

9. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta Arsip dan disimpan dalam jangka waktu tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Arsip Dinamis.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
a. menciptakan keseragaman penggunaan Kode Klasifikasi Arsip dalam pengelolaan Arsip Dinamis
b. mewujudkan tertib Arsip sesuai dengan tugas dan fungsi kegiatan di Pemerintah Daerah; dan
c. menunjang kelancaran penataan berkas dalam penemuan kembali Arsip.

BAB III

PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP

Pasal 4

(1) Kode Klasifikasi Arsip berfungsi sebagai dasar penomoran, pemberkasan, penataan, penyusutan, dan penemuan kembali Arsip.

(2) Daftar Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
a. Peraturan Bupati Rembang Nomor 031 Tahun 2006 tentang Pedoman Pola Klasifikasi Kearsipan di Lingkungan Pemeritah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 33 Seri 6 Nomor 23); dan
b. Lampiran III Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 2).

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 26 Mei 2023

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 26 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Rembang

DEDHY NUGRAHA, S.H., M.Si
Pembina
NIP. 19791206 200604 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
KODE KLASIFIKASI ARSIP

KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN
KABUPATEN REMBANG

000	UMUM			
	0001	KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN		
		000.1.1	Telekomunikasi	
		000.1.2	Perjalanan Dinas Dalam Negeri	
			000.1.2.1	Perjalanan Dinas Kepala Daerah
			000.1.2.2	Perjalanan Dinas DPRD
			000.1.2.3	Perjalanan Dinas Pegawai
		000.1.3	Perjalanan Dinas Luar Negeri	
			000.1.3.1	Perjalanan Dinas Kepala Daerah
			000.1.3.2	Perjalanan Dinas DPRD
			000.1.3.3	Perjalanan Dinas Pegawai
		000.1.4	Penggunaan Fasilitas Kantor (antara lain: Permintaan dan penggunaan ruang, gedung, kendaraan, wisma, rumah dinas dan fasilitas kantor lainnya)	
		000.1.5	Rapat pimpinan antara lain: Notula/Risalah Rapat	
		000.1.6	Penyediaan Konsumsi	
		000.1.7	Pengurusan Kendaraan Dinas	
			000.1.7.1	Pengurusan surat-surat kendaraan dinas
			000.1.7.2	Pemeliharaan dan perbaikan
			000.1.7.3	Pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan
		000.1.8	Pemeliharaan Gedung, Taman dan Peralatan Kantor	
			000.1.8.1	Pertamanan/ Landscape
			000.1.8.2	Penghijauan
			000.1.8.3	Perbaikan Gedung
			000.1.8.4	Perbaikan Peralatan Kantor
			000.1.8.5	Perbaikan Rumah Dinas/ Wisma
			000.1.8.6	Kebersihan Gedung dan Taman
		000.1.9	Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telepon dan Komputer	
			000.1.9.1	Perbaikan/ Pemeliharaan
			000.1.9.2	Pemasangan
		000.1.10	Ketertiban dan Keamanan	
			000.1.10.1	Pengamanan Penjagaan,

				dan Pengawalan terhadap Pejabat, Kantor dan Rumah Dinas
			000.1.10.2	Laporan Ketertiban dan Keamanan
		000.1.11	Administrasi Pengelolaan Parkir	
		000.1.12	Administrasi Pakaian Dinas Pegawai, Satpam, Petugas Kebersihan dan Pegawai lainnya	
	0002	PERLENGKAPAN		
		000.2.1	Inventarisasi dan Penyimpanan	
			000.2.1.1	Data hasil inventarisasi dan penyimpanan
			000.2.1.2	Laporan dan evaluasi inventarisasi dan penyimpanan
		00.2.2	Pemeliharaan peralatan kantor	
			00.2.2.1	Data hasil pemeliharaan kantor
			00.2.2.2	Laporan dan evaluasi pemeliharaan kantor
		000.2.3	Distribusi	
			000.2.3.1	Barang habis pakai
			000.2.3.2	Barang milik daerah
		000.2.4	Penghapusan Barang Milik Daerah antara lain: Keputusan Pembentukan Tim, Berita Acara Penghapusan Barang Milik Daerah, Daftar Barang yang dihapuskan, Laporan Hasil Pelaksanaan Penghapusan BMD termasuk didalamnya proses lelang penghapusan	
		000.2.5	Pengelolaan Database Barang Milik Daerah	
	0003	PENGADAAN		
		000.3.1	Rencana pengadaan Barang dan jasa (antara lain: : Identifikasi dan analisis kebutuhan barang/jasa, penyusunan dan penetapan rencana penganggaran pengadaan, penetapan kebijakan umum,penyusunan kerangka Acuan Kerja (KAK), Pengumuman Rencana Umum Pengadaan)	
		000.3.2	Pengadaan Langsung (antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak)	
		000.3.3	Pengadaan Tidak Langsung/Lelang (antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak)	
		000.3.4	Swakelola (antara lain: perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi)	
		000.3.5	Pengolahan Sistem Informasi Pengadaan antara lain : Data base pengguna sistem informasi pengadaan barang/jasa, Data Base kontrak, Data Base Pengadaan Barang/jasa	

		000.3.6	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan pengadaan antara lain: Laporan Hasil Monitoring, Laporan hasil evaluasi	
	0004	PERPUSTAKAAN		
		000.4.1	Kebijakan di bidang Perpustakaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		000.4.2	Deposit Bahan Pustaka	
			000.4.2.1	Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
			000.4.2.2	Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha Rekaman
			000.4.2.3	Terbitan Internasional dan Regional
			000.4.2.4	Pemantauan Waji Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
			000.4.2.5	Bibliografi dan Katalog
		000.4.3	Koleksi Pustaka	
			000.4.3.1	Pembelian
			000.4.3.2	Hibah
			000.4.3.3	Hadiah
			000.4.3.4	Tukar Menukar
			000.4.3.5	Implementasi Undang-Undang KCKR
			000.4.3.6	Terbitan Internal
			000.4.3.7	Pensdistribusian Bahan Pustaka surplus
			000.4.3.8	Inventarisasi koleksi (Buku Induk)
			000.4.4	Pengolahan Bahan Pustaka
			000.4.5	Pangkalan Data Katalog Koleksi
		000.4.6	Layanan Perpustakaan	
			000.4.6.1	Keanggotaan
			000.4.6.2	Peminjaman
			000.4.6.3	Pengembangan gemar baca
		000.4.7	Kerjasama Perpustakaan	
			000.4.7.1	MoU
			000.4.7.2	Perjanjian kerjasama
			000.4.7.1	Partisipasi organisasi profesi dan kerjasama internasional

		000.4.8	Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan	
			000.4.8.1	Pengembangan situs web
			000.4.8.2	Pengembangan kemas ulang informasi multimedia
			000.4.8.3	Pengembangan program aplikasi perpustakaan
			000.4.8.4	Pengembangan pangkalan data kepustakaan digital
		000.4.9	Pangkalan Data Layanan Perpustakaan	
		000.4.10	Konservasi	
			000.4.10.1	Perawatan Bahan Perpustakaan
			000.4.10.2	Perbaikan Bahan Perpustakaan
			000.4.10.3	Penjilidan Bahan Perpustakaan
		000.4.11	Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto)	
		000.4.12	Transformasi Digital	
		000.4.13	Kurasi Digital	
		000.4.14	Pengembangan Perpustakaan	
			000.4.14.1	Perpustakaan Umum
			000.4.14.2	Perpustakaan Khusus
			000.4.14.3	Perpustakaan Sekolah
			000.4.14.41	Perpustakaan Perguruan Tinggi
	000.5	KEARSIPAN		
		000.5.1	Kebijakan di bidang kearsipan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		000.5.2	Pembinaan Kearsipan	
			000.5.2.1	Pengembangan Profesi Arsiparis, antara lain Formasi Jabatan Arsiparis, Analisis Kebutuhan Arsiparis
			000.5.2.2	Bimbingan Konsultasi Arsiparis
			000.5.2.3	Penilaian Arsiparis
			000.5.2.4	Pemilihan Arsiparis Teladan, antara lain Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Arsiparis Teladan, Berkas

				Penetapan Arsiparis Teladan
			000.5.2.5	Data Base Arsiparis
			000.5.2.6	Bimbingan Konsultasi Kearsipan
			000.5.2.7	Supervisi dan Evaluasi, antara lain: Perencaan Supervisi dan Evaluasi, Pelaksanaan Supervisi dan Evaluasi, Laporan Hasil Supervisi dan Evaluasi
			000.5.2.8	Data Base Bimbingan dan Konsultasi dan Supervisi
			000.5.2.9	Fasilitasi Kearsipan, antara lain: Fasilitasi SDM Kearsipan, Fasilitasi Prasarana dan Sarana Kearsipan
			000.5.2.10	Lembaga/Unit Kearsipan Teladan, antara lain: Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Lembaga/Unit Kearsipan, Berkas Penetapan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan
			000.5.2.11	Jadwal Retensi Arsip, antara lain: Berkas Usulan Persetujuan JRA, Surat Persetujuan JRA dari Kepala ANRI
		000.5.3	Pengelolaan Arsip Dinamis	
			000.5.3.1	Penciptaan (antara lain: Buku Registrasi Naskah Masuk dan Keluar, Buku Agenda, Kartu Kendali, Lembar Pengantar/Buku Ekspedisi)
			000.5.3.2	Pemberkasan Arsip Aktif (antara lain: daftar berkas dan daftar isi berkas)
			000.5.3.3	Penataan Arsip Inaktif (antara lain: daftar arsip inaktif, daftar arsip inaktif tematik)
			000.5.3.4	Penggunaan (antara lain: daftar arsip dinamis berdasarkan sistem klasifikasi keamanan dan

				akses arsip dinamis, bukti peminjaman arsip)
			000.5.3.5	Autentikasi Arsip Dinamis (antara lain: pembuktian autentisitas, pendapat tenaga ahli, pengujian, penetapan autentisitas arsip dinamis)
		000.5.4	Program Arsip Vital (antara lain: Identifikasi Arsip Vital, Perlindungan dan Pengamanan Arsip Vital, Penyelamatan Arsip Vital dan Pemulihan Arsip Vital)	
		000.5.5	Pengelolaan Arsip Terjaga (antara lain: Daftar Identifikasi Arsip Terjaga, Daftar Berkas Arsip Terjaga, Daftar Isi Berkas Arsip Terjaga, Surat Penetapan Autentifikasi Arsip Terjaga, Surat Penyerahan Arsip Terjaga, Daftar Salinan Autentik Arsip Terjaga, Berita Acara Penyerahan Salinan Autentik Arsip Terjaga	
		000.5.6	Penyusutan Arsip	
			000.5.6.1	Pemindahan Arsip (antara lain: Berita Acara Pemindahan, Daftar Arsip yang dipindahkan)
			000.5.6.2	Pemusnahan Arsip (antara lain: SK Penetapan Panitia Penilai Arsip, Pertimbangan Panitia Penilai, Permintaan Persetujuan Kepala ANRI untuk pemusnahan arsip dengan retensi sekurang-kurangnya 10 Tahun atau Persetujuan Kepala Daerah selaku Pimpinan Pencipta Arsip untuk pemusnahan arsip dengan retensi di bawah 10 Tahun, Penetapan Arsip Yang Dimusnahkan, Berita Acara Pemusnahan Arsip, Daftar Arsip Yang Dimusnahkan.
			000.5.6.3	Penyerahan Arsip Statis (antara lain:

				Pembentukan panitia penilai, Notulen rapat panitia, Surat pertimbangan panitia penilai, Surat persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan, Surat pernyataan autentik, terpercaya, utuh, dan digunakan dari pencipta arsip, Keputusan Penetapan Penyerahan, Berita Acara Penyerahan Arsip, Daftar Arsip yang diserahkan)
		000.5.7	Alih Media Arsip (antara lain: Kebijakan alih media, Autentikasi, Berita Acara, Daftar Arsip yang alih mediakan)	
		000.5.8	Data Base Pengelolaan Arsip Dinamis	
			000.5.8.1	Data Base Pengelolaan Arsip Aktif
			000.5.8.2	Data Base Pengelolaan Arsip Inaktif
		000.5.9	Pengelolaan Arsip Statis	
			000.5.9.1	Akuisisi (antara lain: Monitoring fisik dan daftar, Verifikasi terhadap daftar arsip, Menetapkan status arsip statis, Persetujuan untuk Penyerahan, Penetapan arsip yang diserahkan Berita Acara Penyerahan, Daftar Arsip yang diserahkan
			000.5.9.2	Penghargaan dan Imbalan
			000.5.9.3	Sejarah Lisan (antara lain: Administrasi kegiatan, Berita Acara Wawancara Sejarah Lisan, Laporan Kegiatan, Hasil Wawancara (Kaser/CD/media lain sesuai perkembangan TI, dan Transkip)
			000.5.9.4	Daftar Pencarian Arsip Statis (antara lain:

				pengumuman, akuisisi daftar pencarian arsip statis)
			000.5.9.5	Menyusun Sarana Bantu Temu Balik (antara lain: daftar arsip statis, inventaris arsip statis, guide)
			000.5.9.6	Preservasi Preventif (antara lain: penyimpanan, pengendalian hama terpadu, reproduksi (alih media)
			000.5.9.7	Preservasi Kuratif
			000.5.9.8	Autentikasi Arsip Statis (antara lain: pembuktian autentisitas, pendapat tenaga ahli, pengujian, penetapan autentitas arsip statis)
			000.5.9.9	Akses Arsip Statis (antara lain: Layanan arsip, Penerbitan naskah sumber)
		000.5.10	Jasa Kearsipan (antara lain konsultasi kearsipan, manual kearsipan, penataan arsip, otomasi kearsipan, penyimpanan arsip, perawatan dan pemeliharaan arsip)	
		000.5.11	Pengelolaan SIKN dan JIKN	
		000.5.12	Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana	
		000.5.13	Penyelamatan arsip Perangka Daerah digabung dan/atau dibubarkan	
		000.5.14	Penerbitan izin penggunaa arsip yang bersifat tertutup	
		000.5.15	Pengawasan Kearsipan	
			000.5.15.1	Pengawasan Kearsipan Internal
			000.5.15.2	Pengawasan Kearsipan Eksternal
			000.5.15.3	Sanksi
	000.6	PERSANDIAN		
		000.6.1	Kebijakan di bidang Persandian yang dilakukan	

			oleh Pemerintah Daerah	
		000.6.2	Pengamanan persandian	
			000.6.2.1	Pengamanan sinyal: teknik sandi dan kripto
			000.6.2.2	Analisis sinyal: teknik sandi dan kripto
			000.6.2.3	Materiil sandi: sistem dan peralatan
		000.6.3	Pengkajian persandian: Kriptografi, Peralatan Sandi, Komunikasi Sandi	
			000.6.3.1	Perencanaan Pengkajian
			000.6.3.2	Administrasi Pengkajian
			000.6.3.3	Pelaksanaan
			000.6.3.4	Pelaporan
		000.6.4	Pembinaan dan Pengendalian Persandian	
			000.6.4.1	Sumber Daya Manusia (SDM)
			000.6.4.2	Jaring Komunikasi
		000.6.5	Layanan Sertifikasi Elektronik	
			000.6.5.1	Perencanaan dan Administrasi
			000.6.5.2	Pelaksanaan Verifikasi
			000.6.5.3	Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama
			000.6.5.4	Penyesuaian Sistem dan Testing
			000.6.5.5	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengguna
			000.6.5.6	Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Elektronik
			000.6.5.7	Pelaporan
	000.7	PERENCANAAN PEMBANGUNAN		
		000.7.1	Musyawarah Perencanaan Pembangunan/Musrenbang	
			000.7.1.1	Musrenbang Provinsi
			000.7.1.2	Musrenbang Nasional
			000.7.1.3	Musrenbang Kab/Kota
			000.7.1.4	Musrenbang Kecamatan
			000.7.1.5	Musrenbang Kelurahan
			000.7.1.6	Musrenbang Desa
		000.7.2	Perencanaan Pembangungan Daerah	
			000.7.2.1	Rencana Pembangunan Jangka Panjang
			000.7.2.2	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
			000.7.2.3	Rencana Anggaran Daerah

			000.7.2.4	Rencana Pembangunan Tahunan
			000.7.2.5	Rencana Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah
			000.7.2.6	Program kerja tahunan
			000.7.2.7	Penetapan / Kontrak Kinerja
			000.7.2.8	Laporan Berkala
			000.7.2.9	Laporan Insidential
			000.7.2.10	Evaluasi Program
		000.7.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	
		000.7.4	Konsultasi Perencanaan Pembangunan	
		000.7.5	Pemantauan, Evaluasi, Penilaian, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan	
		000.7.6	Aksi Strategis Daerah	
			000.7.6.1	Rancangan awal perencanaan aksi strategi daerah
			000.7.6.2	Rapat pembahasan rancangan awal dengan Perangkat Daerah
			000.7.6.3	Sosisalisasi dengan Perangkat Daerah
			000.7.6.4	Rancangan akhir perencanaan aksi strategi daerah
			000.7.6.5	Penerapanperencaan aksi strategi daerah
		000.7.7	Perencanaan Pendanaan Pembangunan	
			000.7.7.1	Pendanaan Nasional dan Hibah
			000.7.7.2	Pendanaan Daerah
			000.7.7.3	Kerjasama Pembangunan Nasional
			000.7.7.4	Surat Berharga Syariah Negara
			000.7.7.5	Pendanaan On Top atau Inisiatif Baru
	000.8	ORGANISASI DAN TATA LAKSANA		
		000.8.1	Struktur Organisasi di lingkunganm Pemerintahan Daerah Kab/Kota	
			000.8.1.1	Pembentukan
			000.8.1.2	Pengubahan
			000.8.1.3	Pembubaran

		000.8.2	Uraian Jabatan	
			000.8.2.1	Analisa Jabatan
			000.8.2.2	Analisa Beban Kerja
		000.8.3	Ketatalaksanaan	
			000.8.3.1	Proses Bisnis
			000.8.3.2	Standar Pelayanan
			000.8.3.3	Standar Operasional Prosedur
			00.8.3.4	Pelayanan Publik
		000.8.4	Standar Kompetensi jabatan struktural dan fungsional	
		000.8.5	Evaluasi Kelembagaan	
		000.8.6	Koordinasi Penguatan Reformasi dan Birokrasi	
			000.8.6.1	Budaya Kerja
			000.8.6.2	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi
			000.8.6.3	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
	000.9	PENELITIAN, PENGKAJIAN, DAN PENGEMBANGAN		
		000.9.1	Kebijakan di bidang penelitian, pengkajian, pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah	
		000.9.2	Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan meliputi: rencana kerja, administrasi penelitian, pelaksanaan, hasil penelitian/pengkajian/rekomendasi	
		000.9.3	Sosialisasi dan desiminasi hasil penelitian, hasil pengkajian dan pengembangan	
		000.9.4	Bimbingan teknis penelitian, pengkajian dan pengembangan	
		000.9.5	Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	
		000.9.6	000.9.6 Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	
			000.9.6.1	Data
			000.9.6.2	Statistik
			000.9.6.3	Jurnal Hasil Penelitian/Pengkajian
		000.9.7	Master proceeding/ jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	
		000.9.8	Hak atas kekayaan intelektual (HaKI)	
		000.9.9	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan	
		000.9.10	Seminar, lokakarya, temukarya, workshop	

100	PEMERINTAHAN			
	100.1	OTONOMI DAERAH		
		100.1.1	Kebijakan di bidang Otonomi Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		100.1.2	Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Fasilitasi, Bimbingan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi)	
		100.1.3	Penataan Daerah, Pembinaan Daerah Pemekaran, Otonomi Khusus, Daerah Istimewa dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)	
		100.1.4	Pemilihan Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)	
			100.1.4.1	Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah
			100.1.4.2	Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
			100.1.4.3	Penyiapan Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Kapasitas Kepala Daerah dan DPRD di Bidang Pemerintahan
			100.1.4.4	Hubungan Antar Lembaga Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD)
			100.1.4.5	Assosiasi Daerah
		100.1.5	Otonomi khusus dan daerah istimewa	
		100.1.6	Peningkatan Kapasitas Dan Evaluasi Kinerja Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)	
			100.1.6.1	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
			100.1.6.2	KemampuanPenyelenggaraan Otonomi Daerah
			100.1.6.3	Pengembangan Kapasitas Daerah
		100.1.7	LKPJ/ LKPJAMJ dan LPPD (Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi)	
	100.2	PEMERINTAHAN UMUM		
		100.2.1	Kebijakan di bidang Pemerintahan Umum yang	

			dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		100.2.2	Dekonsentrasi dan Kerjasama	
			100.2.2.1	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
			100.2.2.2	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah
			100.2.2.3	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah
			100.2.2.4	Fasilitasi Kecamatan
			100.2.2.5	Fasilitasi Pelayanan Umum
		100.2.3	Wilayah Administrasi dan Perbatasan	
			100.2.3.1	Toponimi dan Data Wilayah
			100.2.3.2	Pengembangan dan Penataan Batas Antar Negara
			100.2.3.3	Batas Antar Daerah Wilayah
			100.2.3.4	Penataan Batas Wilayah Antar Kecamatan, Batas Wilayah Antar Kelurahan Satu Kecamatan Dan Batas Wilayah Kelurahan Antar Kecamatan
			100.2.3.5	Pemeliharaan Batas Wilayah
	100.3	HUKUM		
		100.3.1	Program Legislasi	
			100.3.1.1	Bahan/Materi Program Legislasi Daerah
			100.3.1.2	Program Legislasi
		100.3.2	Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Rancangan Peraturan Daerah, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah	

			hukum sampai diundangkan	
		100.3.3	Keputusan/Ketetapan Pimpinan Pemerintah	
			100.3.3.1	Keputusan / Ketetapan Gubernur
			100.3.3.2	Keputusan / Ketetapan Bupati
			100.3.3.3	Keputusan / Ketetapan Walikota
			100.3.3.4	Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi
			100.3.3.5	Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten
			100.3.3.6	Keputusan Sekretaris Daerah Kota
		100.3.4	Instruksi / Surat Edaran	
			100.3.4.1	Instruksi / Surat Edaran Provinsi
			100.3.4.2	Instruksi / Surat Edaran Kabupaten
			100.3.4.3	Instruksi / Surat Edaran Kota
			100.3.4.4	Instruksi / Surat Edaran Setingkat Eselon II
		100.3.5	Surat Perintah	
			100.3.5.1	Surat Perintah Gubernur
			100.3.5.2	Surat Perintah Bupati
			100.3.5.3	Surat Perintah Walikota
			100.3.5.4	Surat Perintah Setingkat Eselon II
		100.3.6	Standar/ Pedoman/ Prosedur Kerja/ Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis	
		100.3.7	Nota Kesepakatan/ Memorandum of Understanding (MOU)/ Kontrak/ Perjanjian kerja sama	
			100.3.7.1	Dalam Negeri
			100.3.7.2	Luar Negeri
		100.3.8	Dokumentasi Hukum, (antara lain: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan-Peraturan yang dijadikan referensi)	
		100.3.9	Sosialisasi/Penyuluhan/PembinaanHukum	
		100.3.10	Bantuan/ Konsultasi Hukum/ Advokasi Pemberian bantuan/ konsultasi hukum (Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan	

			Agama)	
		100.3.11	Kasus/ Sengketa Hukum	
			100.3.11.1	Pidana Kasus/ sengketa pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran
			100.3.11.2	Perdata Kasus/sengketa perdata
			100.3.11.3	Tata Usaha Negara
			100.3.11.4	Perburuhan
			100.3.11.5	Arbitrase
			100.3.11.6	Sengketa Adat
		100.3.12	Perijinan	
		100.3.13	Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)	
			100.3.13.1	Hak Cipta
			100.3.13.2	Hak Paten
			100.3.13.3	Hak Desain Industri
			100.3.13.4	Hak Rahasia Dagang
			100.3.13.5	Hak Merk
		100.3.14	Permohonan HAKI yang ditolak	
200	POLITIK			
	200.1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
		200.1.1	Kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		200.1.2	Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	
			200.1.2.1	Ketahanan Ideologi Negara
			200.1.2.2	Wawasan Kebangsaan
			200.1.2.3	Bela Negara
			200.1.2.4	Nilai Nilai Sejarah Kebangsaan
			200.1.2.5	Pembauran dan Kewarganegaraan
		200.1.3	Kewaspadaan Nasional	
			200.1.3.1	Fasilitasi dan Evaluasi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan
			200.1.3.2	Fasilitasi Bina Masyarakat Perbatasan Antar Negara dan Kehidupan Masyarakat Perbatasan
			200.1.3.3	Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Pemerintahan
			200.1.3.4	Fasilitasi dan Laporan Penanganan Konflik

				Sosial
			200.1.3.5	Fasilitasi Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing
		200.1.4	Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agama, dan Kemasyarakatan	
			200.1.4.1	Ketahanan Seni
			200.1.4.2	Ketahanan Budaya
			200.1.4.3	Agama dan Kepercayaan
			200.1.4.4	Organisasi Kemasyarakatan
			200.1.4.5	Masalah Sosial Kemasyarakatan
			200.1.4.6	Fasilitasi
			200.1.4.7	Pelaksanaan Identifikasi dan Kompilasi Organisasi Masyarakat
			200.1.4.8	Laporan Hasil Kerjasama Kegiatan Dengan Ormas/LNL
			200.1.4.9	Evaluasi Aktifitas Ormas: Sanksi Administrasi
			200.1.4.10	Fasilitasi Sengketa Ormas
			200.1.4.11	Fasilitasi Ormas
		200.1.5	Politik Dalam Negeri	
			200.1.5.1	Implementasi Kebijakan Politik
			200.1.5.2	Fasilitasi KelembagaanPolitik Pemerintahan
			200.1.5.3	Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik
			200.1.5.4	Verifikasi dan Evaluasi Partai Politik Yang Memperoleh Kursi
			200.1.5.5	Partai Politik Yang Tidak Memperoleh Kursi
			200.1.5.6	Pemerintah Daerah
			200.1.5.7	Database Parpol
			200.1.5.8	Pendidikan Budaya Politik
			200.1.5.9	Pemilihan Umum
		200.1.6	Ketahanan Ekonomi	
			200.1.6.1	Ketahanan Sumberdaya Alam dan Kesenjangan

				Perekonomian
			200.1.6.2	Ketahanan Perdagangan Investasi, Fiskal dan Moneter
			200.1.6.3	Perilaku Perekonomian Masyarakat
			200.1.6.4	200.1.6.4 Ketahanan Lembaga Sosial Ekonomi
	200.2	PEMILU		
		200.2.1	Kebijakan di bidang Pemilu yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		200.2.2	Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih	
			200.2.2.1	Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) Pemilu
			200.2.2.2	Daftar Pemilih Sementara (DPS)
			200.2.2.3	Daftar Pemilih Tambahan
			200.2.2.4	Keputusan KPU tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT)
			200.2.2.5	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)
		200.2.3	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	
			200.2.3.1	Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari partai politik
			200.2.3.2	Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faktual partai politik
			200.2.3.3	Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari Calon Perseorangan
			200.2.3.4	Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faKtual
		200.2.4	Penetapan Peserta Pemilu	
			200.2.4.1	Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota
			200.2.4.2	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPR
			200.2.4.3	Keputusan KPU tentang

				penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPR
			200.2.4.4	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota
			200.2.4.5	Peta Daerah Pemilihan
		200.2.5	Pencalonan Pemilu	
			200.2.5.1	Petunjuk teknis pencalonan
			200.2.5.2	Surat pencalonan pendaftaran
			200.2.5.3	Daftar bakal calon
			200.2.5.4	Dokumen persyaratan masing-masing bakal calon
			200.2.5.5	Dokumen verifikasi administrasi
			200.2.5.6	Daftar Calon Sementara dan Calon Tetap
		200.2.6	Kampanye Pemilu	
			200.2.6.1	Keputusan KPU tentang penetapan jadwal kampanye
			200.2.6.2	Nama juru kampanye/pelaksana kampanye
			200.2.6.3	Peringatantertulis/penghentian kegiatan kampanye
		200.2.7	Dana Kampanye	
			200.2.7.1	Pedoman audit dana kampanye
			200.2.7.2	Laporan dana kampanye peserta Pemilu
			200.2.7.3	Laporan hasil audit dana kampanye
		200.2.8	Pemungutan dan Penghitungan Suara	
			200.2.8.1	Keputusan KPU tentang desain dan spesifikasi surat suara
			200.2.8.2	Master surat suara
			200.2.8.3	Surat suara yang terpakai
			200.2.8.4	Surat Suara Tidak terpakai (rusak, salah,

				dan tidak digunakan)
			200.2.8.5	Formulir pemilu di Pemerintah Daerah
		200.2.9	Penetapan Hasil Pemilu	
		200.2.10	Perselisihan Hasil Pemilu	
			200.2.10.1	Surat-surat mengenai Perselisihan Hasil Pemilu
			200.2.10.2	Jawaban dan kesimpulan termohon
			200.2.10.3	Salinan Putusan lembaga peradilan
		200.2.11	Laporan hasil penyelenggaraan Pemilu	
300	KEAMANAN DAN KETERTIBAN			
	300.1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
		300.1.1	Kebijakan di bidang Polisi Pamong Praja yang dilakukan di Pemerintah Daerah	
		300.1.2	Tata Operasional dan Prasarana Sarana Polisi Pamong Praja	
			300.1.2.1	Tata Operasiona Polisi Pamong Praja
			300.1.2.2	Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja
		300.1.3	Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja	
		300.1.4	Perlindungan Masyarakat	
		300.1.5	Penyidik Pegawai Negeri Sipil	
		300.1.6	Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia	
	300.2	PENANGGULANGAN BENCANA, PENCARIAN, DAN PERTOLONGAN		
		300.2.1	Kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		300.2.2	Perencanaan Penanggulangan Bencana, Pencarian, dan Pertolongan	
			300.2.2.1	Rencana dan standardisasi dan pengawakan dan perbekalan
			300.2.2.2	Kurikulum dan silabus, evaluasi dan monitoring
			300.2.2.3	Tenaga pencarian pertolongan, penyiapan potensi pencarian dan pertolongan
			300.2.2.4	Permasyarakatan

				pencarian dan pertolongan, sertifikasi pencarian dan pertolongan
			300.2.2.5	300.2.2.5 Perencanaan dan standardisasi, penyelenggaraan operasi SAR, Siaga dan latihan, tempat latihan
			300.2.2.6	Registrasi BEACON
		300.2.3	Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
		300.2.4	Potensi Pencarian dan Pertolongan	
		300.2.5	Bina Ketenagaan dan Pemasyarakatan	
			300.2.5.1	Rencana Pendidikan dan Pelatihan
			300.2.5.2	Penyiapan tenaga dan potensi Pencarian dan Pertolongan
			300.2.5.3	Pemasyarakatan dan Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan
			300.2.5.4	Pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan (Sosialisasi dan Penyuluhan)
			300.2.5.5	Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan
		300.2.6	Operasi Pencarian dan Pertolongan	
		300.2.7	Rencana Pengembangan dan Standardisasi Komunikasi	
		300.2.8	Operasi Komunikasi	
			300.2.8.1	Operasi Peralatan Komunikasi (Berita SAR)
			300.2.8.2	Operasi Peralatan Deteksi Dini (Berita SAR)
			300.2.8.3	Registrasi BEACON
		300.2.9	Inventarisasi dan Pemeliharaan	
		300.2.10	Pengembangan Sistem Informasi	
		300.2.11	Penyajian dan Layanan Informasi	
		300.2.12	Pelapooran dan Evaluasi	
			300.2.12.1	Laporan Harian
			300.2.12.2	Laporan Bulanan
			300.2.12.3	Laporan Tahunan
			300.2.12.4	Evaluasi
400	KESEJAHTERAAN RAKYAT			
	400.1	PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL		
		400.1.1	Kebijakan di bidang Pembangunan Daerah	

			Tertinggal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		400.1.2	Pembangunan Sumber Daya	
			400.1.2.1	Fasilitasi Pendidikan ketrampilan Pengembangan Sumber Daya
			400.1.2.2	Fasilitasi Kesehatan Pengembangan Sumber Daya
			400.1.2.3	Fasilitasi Sumber daya hayati dan Pengembangan Sumber Daya
			400.1.2.4	Fasilitasi Mineral, energi dan lingkungan hidup
			400.1.2.5	Fasilitasi Teknologi dan inovasi
			400.1.2.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya
			400.1.2.7	Pemantauan dan evaluasi
		400.1.3	Peningkatan Infrastruktur	
			400.1.3.1	Fasilitasi Transportasi peningkatan infrastruktur
			400.1.3.2	Fasilitasi Informasi dan Telekomunikasi dalam peningkatan infrastruktur
			400.1.3.3	Fasilitasi Sosial dalam peningkatan infrastruktur
			400.1.3.4	Fasilitasi Ekonomi dalam peningkatan infrastruktur
			400.1.3.5	Fasilitasi energi dalam peningkatan infrastruktur
			400.1.3.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan infrastruktur
			400.1.3.7	Pemantauan dan evaluasi
		400.1.4	Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha	
			400.1.4.1	Fasilitasi Investasi pembinaan ekonomi dan dunia usaha
			400.1.4.2	FasilitasiKelembagaan

				ekonomi dan dunia usaha
			400.1.4.3	Fasilitasi Usaha mikro, kecil dan menengah
			400.1.4.4	Fasilitasi Kemitraan usaha
			400.1.4.5	Fasilitasi Pengembangan komoditas unggulan
			400.1.4.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan ekonomi dan dunia usaha
			400.1.4.7	Pemantauan dan evaluasi
			400.1.4.8	Identifikasi dan inventarisasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan tertinggal
			400.1.4.9	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan tertinggal
			400.1.4.10	Monitoring dan evaluasi Ekonomi desa tertinggal
			400.1.4.11	Identifikasi dan inventarisasipengembangan masyarakat dan desa tertinggal
			400.1.4.12	Fasilitasipengembangan masyarakat dan desa tertinggal
			400.1.4.13	Monitoring dan evaluasi Masyarakat tertinggal
			400.1.4.14	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa
		400.1.5	Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya	
			400.1.5.1	Penguatan kapasitas lembaga lokal
			400.1.5.2	Penguatan organisasi masyarakat
			400.1.5.3	Pemberdayaan masyarakat
			400.1.5.4	Kerjasama antar lembaga sosial dan budaya
			400.1.5.5	Ketenagakerjaan
			400.1.5.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan lembaga sosial dan budaya
			400.1.5.7	Pemantauan dan evaluasi

		400.1.6	Pengembangan Daerah Khusus	
			400.1.6.1	Fasilitasipengembangan Daerah perbatasan
			400.1.6.2	Fasilitasipengembangan Daerah rawan konflik dan bencana
			400.1.6.3	Fasilitasipengembangan Daerah Perdesaan
			400.1.6.4	Fasilitasipengembangan Daerah pulau terpencil dan terluar
			400.1.6.5	Fasilitasipengembangan Wilayah strategis
			400.1.6.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakanpengembangan daerah khusus
			400.1.6.7	Pemantauan dan evaluasi
	400.2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
		400.2.1	Kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		400.2.2	Pengarusutamaan Gender Ekonomi, Politik Sosial dan Hukum	
			400.2.2.1	Data gender
			400.2.2.2	Advokasi dan fasilitasi
		400.2.3	Perlindungan Perempuan (Kekerasan, Masalah Sosial, Tenaga Kerja, Korban Perdagangan)	
			400.2.3.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan
			400.2.3.2	Data perlindungan perempuan
			400.2.3.3	Advokasi dan fasilitasi
			400.2.3.4	Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan perempuan
			400.2.3.5	Sistem aplikasi dan jaringan informasi gender
			400.2.3.6	Analisis danpenyajian informasi gender
			400.2.3.7	Partisipasi publik untuk kesejahteraan ibu
		400.2.4	Perlindungan Anak (Hak Sipil, Masalah Sosial, Kekerasan Terhadap Anak, Anak Berkebutuhan Khusus, Anak Berhadapan Dengan Hukum)	
			400.2.4.1	Pencegahan Kekerasan

				terhadap Anak
			400.2.4.2	Data perlindungan anak
			400.2.4.3	Advokasi dan fasilitasi
			400.2.4.4	Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan anak
			400.2.4.5	Partisipasi publik untuk kesejahteraan anak
		400.2.5	Tumbuh Kembang Anak (Pendidikan, Kesehatan, Partisipasi, Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur, Pengembangan Kota Layak Anak)	
			400.2.5.1	Pemenuhan Hak Anak
			400.2.5.2	Data Klaster Hak Anak
			400.2.5.3	Data tumbuh kembang anak
			400.2.5.4	Advokasi dan fasilitasi
			400.2.5.5	Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan tumbuh kembang anak
			400.2.5.6	Penyelenggaraan parenting pola pengasuhan anak
		400.2.6	Penghargaan terkait gender (Anugerah Parahita Ekapraya/APE)	
		400.2.7	Penghargaan Kabupaten Layak Anak	
		400.2.8	Penghargaan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak	
	400.3	PENDIDIKAN		
		400.3.1	Kebijakan di bidang Pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		400.3.2	Pendidikan AnakUsia Dini (PAUD) Nonformal, Informal	
			400.3.2.1	Bahan Ajar (Alat Permainan Edukatif)
			400.3.2.2	Pelatihan Sosial
			400.3.2.3	Peringatan Hari anak
			400.3.2.4	Block Grant
		400.3.3	Pendidikan Masyarakat	
			400.3.3.1	Penyelenggaraan Program
			400.3.3.2	Penilaian dan pemberian bantuan sosial
			400.3.3.3	Pembinaan Program
			400.3.3.4	Lomba/PemberianPenghargaan
			400.3.3.5	Pameran

			400.3.3.6	Rakor
			400.3.3.7	Sosialisasi
			400.3.3.8	Sertifikasi dan Akreditasi
		400.3.4	Kursus/Pelatihan Pendidik dan Tenaga Pendidik	
		400.3.5	Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama	
			400.3.5.1	Kurikulum, bahan ajar
			400.3.5.2	Block Grant
			400.3.5.3	Pelatihan, Bimtek, sosialisasi
			400.3.5.4	Lomba, penghargaan, penganugerahan
			400.3.5.5	Bantuan operasional sekolah (BOS)
			400.3.5.6	Bantuan Siswa Miskin
		400.3.6	Pendidikan khusus/Layanan Khusus	
			400.3.6.1	Kurikulum, Bahan ajar, alat bantu pembelajaran
			400.3.6.2	Block Grant
			400.3.6.3	Lomba, festival
			400.3.6.4	Sosialisasi, bimtek
			400.3.6.5	Pendataan
			400.3.6.6	Kelembagaan
		400.3.7	Pembinaan Pendidik dan Tenaga Pendidik	
			400.3.7.1	Pendataan dan Pemetaan
			400.3.7.2	Uji Kompetensi Guru
			400.3.7.3	Sertifikasi Guru
			400.3.7.4	Penghargaan guru dan tenaga kependidikan
			400.3.7.5	Peningkatan kesejahteraan guru
			400.3.7.6	Sosialisasi, bimtek
			400.3.7.7	Block Grant
		400.3.8	Sekolah Menengah Atas	
			400.3.8.1	Kurikulum
			400.3.8.2	Bahan Ajar
			400.3.8.3	Pelatihan
			400.3.8.4	Block grant
			400.3.8.5	Bimbingan teknis/sosialisasi
			400.3.8.6	Lomba, Sayembara, festival
			400.3.8.7	Bantuan operasional Sekolah (BOS)
			400.3.8.8	Bantuan siswa miskin
		400.3.9	Pendidikan Khusus-Layanan Khusus	
			400.3.9.1	Bahan ajar

			400.3.9.2	Petunjuk Teknis
			400.3.9.3	Block grant
			400.3.9.4	Sosialisasi, bimtek
			400.3.9.5	Lomba, sayembara, jambore, festival
			400.3.9.6	Kurikulum/bahan pembelajaran
			400.3.9.7	Alat bantu pembelajaran
			400.3.9.8	Pendataan
			400.3.9.9	Kelembagaan (Unit kesehatan sekolah, Pendidikan jasmani adaptif, pendidikan inklusi
		400.3.10	Pendidik dan Tenaga Pendidik	
			400.3.10.1	Pendataan dan Pemetaan
			400.3.10.2	Uji Kompetensi Guru
			400.3.10.3	Setifikasi Guru
			400.3.10.4	Penilaian prestasi kerja guru dan pengawas sekolah
			400.3.10.5	Penghargaan guru dan tenaga kependidikan
			400.3.10.6	Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik
			400.3.10.7	Block grant
			400.3.10.8	Bimbingan teknis/sosialisasi
		400.3.11	Penilaian Pendidikan	
			400.3.11	Penilaian Akademik
			400.3.12	Penilaian Non Akademik
			400.3.13	Analisis dan Sistem Informasi Penilaian
		400.3.12	Data dan Statistik Pendidikan	
			400.3.12.1	Data peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan
			400.3.12.2	Data Satuan Pendidikan dan Proses Pembelajaran
		400.3.13	Prasarana dan Sarana Pendidikan	
			400.3.13.1	Prasarana Pendidikan
			400.3.13.2	Sarana Pendidikan
			400.3.13.3	Monitoring dan Evaluasi
	400.4	KEOLAHRAGAAN		
		400.4.1	Kebijakan di bidang Keolahragaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	

		400.4.2	Pengelolaan Olahraga Pendidikan	
			400.4.2.1	Olahraga Pendidikan Dasar dan Menengah
			400.4.2.2	Olahraga Pendidikan Tinggi
			400.4.2.3	Olahraga Pendidikan Nonformal dan Informal
		400.4.3	Pengelolaan Olahraga Rekreasi	
			400.4.3.1	Olahraga Massal
			400.4.3.2	Olahraga Tradisional
			400.4.3.3	Olahraga Petualangan, Tantangan dan wisata
		400.4.4	Pengelolaan Pembinaan Sentra dan sekolah Khusus Olahraga	
			400.4.4.1	Olahraga Pendidikan
			400.4.4.2	Olahraga Rekreasi
			400.4.4.3	Olahraga Prestasi
			400.4.4.4	Sekolah Khusus Olahraga
		400.4.5	Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus	
			400.4.5.1	Olahraga Tradisional
			400.4.5.2	Layanan Khusus
		400.4.6	Kemitraan dan Penghargaan Olahraga	
			400.4.6.1	Kemitraan Keolahragaan
			400.4.6.2	Penghargaan Olahraga
		400.4.7	Pembibitan dan IPTEK Olahraga	
			400.4.7.1	Pembibitan Olahraga
			400.4.7.2	Kompetisi
			400.4.7.3	IPTEK Olahraga
		400.4.8	Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan	
			400.4.8.1	Tenaga Keolahragaan
			400.4.8.2	Organisasi Keolahragaan
		400.4.9	Industri dan Promosi Olahraga	
			400.4.9.1	Industri Olahraga
			400.4.9.2	Promosi Olahraga
		400.4.10	Olahraga Prestasi	
			400.4.10.1	Daerah
			400.4.10.2	Nasional
			400.4.10.3	Internasional
		400.4.11	Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga	
			400.4.11.	Standardisasi Keolahragaan
			400.4.11.2	Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan

			400.4.11.3	Infrastruktur Olahraga
	400.5	KEPEMUDAAN		
		400.5.1	Kebijakan di bidang Kepemudaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		400.5.2	Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda	
			400.5.2.1	Penelusuran (Duta Kepemudaan)
			400.5.2.2	Pengkajian (Rekomendasi Kepemudaan melalui forum kepemudaan)
			400.5.2.3	Pengembangan
		400.5.3	Peningkatan Wawasan Pemuda	
			400.5.3.1	Wawasan Kebangsaan
			400.5.3.2	Wawasan Lingkungan
			400.5.3.3	Wawasan Sosial dan Hukum
		400.5.4	Peningkatan Kapasitas Pemuda	
			400.5.4.1	Kapasitas Iman dan Taqwa
			400.5.4.2	Kapasitas IPTEK
			400.5.4.3	Pemanfaatan IPTEK
		400.5.5	Peningkatan Kreativitas Pemuda (Pemetaan Kreativitas/seni kepemudaan)	
			400.5.5.1	Pengkajian
			400.5.5.2	Pengembangan
			400.5.5.3	Pendayagunaan (fasilitasi)
		400.5.6	Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	
			400.5.6.1	Kepemimpinan: Penelusuran, Pengaderan, Pendayagunaan
			400.5.6.2	Kepeloporan Pemuda: Kesukarelawanan, Pengembangan kepedulian, pendampingan
		400.5.7	Kewirausahaan	
			400.5.7.1	Kelembagaan
			400.5.7.2	Pengaderan
			400.5.7.3	Perintisan
		400.5.8	Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan	
			400.5.8.1	Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan: Kelembagaan dan

				Sumberdaya
			400.5.8.2	PemberdayaanOrganisasi Kemahasiswaan: Kelembagaan dan Sumberdaya
			400.5.8.3	Pemberdayaan Organisasi Kepelajaran: Kelembagaan dan Sumberdaya
			400.5.8.4	Pengawasan Kepramukaan: Kelembagaan, Program dan Sumberdaya
		400.5.9	Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda	
			400.5.9.1	Standardisasi
			400.5.9.2	Infrastruktur Pemuda
		400.5.10	Kemitraan dan Penghargaan Pemuda	
			400.5.10.1	Kemitraan
			400.5.10.2	Penghargaan Pemuda
	400.6	KEBUDAYAAN		
		400.6.1	Kebijakan di bidang Kebudayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		400.6.2	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	
			400.6.2.1	Registrasi Nasional
			400.6.2.2	Pelindungan
			400.6.2.3	Pengembangan dan Pemanfaatan
			400.6.2.4	Eksplorasi dan Dokumentasi
		400.6.3	Pembinaan Kesenian dan Perfilman	
			400.6.3.1	Pembinaan Seni Pertunjukan
			400.6.3.2	Pembinaan Seni Rupa
			400.6.3.3	Pembinaan Seni Literasi dan apresiasi film
			400.6.3.4	Dokumentasi dan Publikasi
		400.6.4	Sejarah dan Nilai Budaya	
			400.6.4.1	Sejarah
			400.6.4.2	Pemetaan nilai
			400.6.4.3	Verifikasi dan Perumusan Nilai
			400.6.4.4	Dokumentasi dan Publikasi
			400.6.4.5	Dokumentasi sejarah dan nilai sejarah

			400.6.4.6	Publikasi sejarah dan nilai sejarah
		400.6.5	Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya	
			400.6.5.1	Internalisasi nilai budaya
			400.6.5.2	Kekayaan budaya
			400.6.5.3	Warisan budaya nasional dan dunia
			400.6.5.4	Diplomasi budaya
	400.7	KESEHATAN		
		400.7.1	Kebijakan di bidang Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		400.7.2	Upaya Kesehatan Dasar	
			400.7.2.1	Pelayanan kedokteran keluarga
			400.7.2.2	Praktek klinis dokter di pelayanan kesehatan primer
			400.7.2.3	Pelaksanaan kesehatan primer
			400.7.2.4	Kesehatan gigi dan mulut di puskesmas
			400.7.2.5	Kesehatan gigi dan mulut di rumah sakit
			400.7.2.6	ICD 10, Destistry & Stomatology
			400.7.2.7	Infeksi menular lewat transfusi darah
			400.7.2.8	Penyakit mulut di tingkat primer
			400.7.2.9	Pembiayaan darah
			400.7.2.10	Penggunaan darah rasional
			400.7.2.11	Unit transfusi darah, bank darah rumah sakit dan jejaring pelayanan darah
			400.7.2.12	Pelayanan kesehatan di daerah terpencil, sangat terpencil dan kepulauan
			400.7.2.13	Akreditasi puskesmas
			400.7.2.14	Puskesmas berprestasi
		400.7.3	Upaya Kesehatan Rujukan	
			400.7.3.1	Pelayanan kesehatan rujukan
			400.7.3.2	Pelayanan kedokteran,

				organisasi profesi dan konsorsium upaya kesehatan (KUK)
			400.7.3.3	Pelayanan rumah sakit privat
			400.7.3.4	Pelayanan kesehatan rumah sakit khusus dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya
			400.7.3.5	Pelayanan kesehatan rumah sakit pendidikan
			400.7.3.6	Pelayanan pasien jaminan kesehatan
			400.7.3.7	Fasilitas pelayanan kesehatan asing dan perdagangan jasa
			400.7.3.8	Badan pengawas rumah sakit
			400.7.3.9	Perizinan dan penetapan kelas rumah sakit kelas A dan Penanam Modal Asing (PMA)
			400.7.3.10	Akreditasi rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya
		400.7.4	Keperawatan dan keteknisian medik	
			400.7.4.1	Pelayanan Keperawatan Dasar
			400.7.4.2	Pelayanan keperawatan profesional di rumah sakit
			400.7.4.3	Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum
			400.7.4.4	Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus
			400.7.4.5	Bina pelayanan kebidanan
		400.7.5	Penunjang medik dan sarana kesehatan	
			400.7.5.1	Mikrobiologi dan imunologi
			400.7.5.2	Patologi dan toksilogi
			400.7.5.3	Radiologi
			400.7.5.4	Perizinan dan sertifikasi
			400.7.5.5	Sarana dan prasarana kesehatan
			400.7.5.6	Peralatan medis di

				fasilitas pelayanan kesehatan
			400.7.5.7	Aplikasi sarana dan prasarana alat kesehatan
		400.7.6	Kesehatan Jiwa	
			400.7.6.1	Kesehatanjiwa di non fasilitas pelayanan kesehatan
			400.7.6.2	Bina kesehatan jiwa difasilitas pelayanan kesehatan
			400.7.6.3	Etikolegal dan asesmen
			400.7.6.4	Pencegahan dan penanggulangan narkotika dan sejenisnya
			400.7.6.5	Etikolegal dan asesmen
			400.7.6.6	Kesehatan jiwa kelompok beresiko
		400.7.7	Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra	
			400.7.7.1	Surveilans dan respon kejadian luar biasa
			400.7.7.2	Imunisasi
			400.7.7.3	Karantina kesehatan dan kesehatan di pelabuhan
			400.7.7.4	Kesehatan matra
		400.7.8	Pengendalian penyakit menular langsung	
			400.7.8.1	Pengendalian tuberkolosis
			400.7.8.2	Pengendalian AIDS dan penyakit menular seksual
			400.7.8.3	Pengendalian infeksi saluran pernafasan akut
			400.7.8.4	Pengendalian diare dan infeksi saluran pencernaan
			400.7.8.5	400.7.8.5 Pengendalian kusta dan frambusia
		400.7.9	Pengendalian penyakit bersumber binatang	
			400.7.9.1	Pengendalian malaria
			400.7.9.2	Pengendalian arbovirosis
			400.7.9.3	Pengendalian zoonosis
			400.7.9.4	Pengendalian filariasis dan kecacingan
		400.7.10	Pengendalian penyakit tidak menular	
			400.7.10.1	Pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah

			400.7.10.2	Pengendalian penyakit diabetes melitus dan penyakit metabolik
			400.7.10.3	Penyakit kanker
			400.7.10.4	Penyakit kronis dan generatif
			400.7.10.5	Gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan
		400.7.11	Penyehatan lingkungan	
			400.7.11.1	Penyehatan air dan sanitasi dasar
			400.7.11.2	Pemukiman dan tempat umum
			400.7.11.3	Kawasan dan sanitasi darurat
			400.7.11.4	Higien sanitasi pangan
			400.7.11.5	Pengamanan limbah, udara, radiasi
		400.7.12	Pengembangan dan penapisan teknologi pengendalian penyakit dan pengendalian lingkungan	
		400.7.13	Gizi	
			400.7.13.1	Gizi makro
			400.7.13.2	Gizi mikro
			400.7.13.3	Gizi klinik dan diatetik
			400.7.13.4	Konsumsi makanan dan jasa makanan
			400.7.13.5	Kewaspadaan gizi
		400.7.14	Kesehatan ibu	
			400.7.14.1	Kesehatan ibu hamil
			400.7.14.2	Kesehatan ibu bersalin dan nifas
			400.7.14.3	Kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi
			400.7.14.4	Keluarga berencana
			400.7.14.5	Perlindungan kesehatan reproduksi
		400.7.15	Kesehatan anak	
			400.7.15.1	Kelangsungan hidup bayi
			400.7.15.2	Kelangsungan anak balita dan pra sekolah
			400.7.15.3	Kewaspadaan penanganan balita beresiko
			400.7.15.4	Kualitas hidup anak usia

				sekolah dan remaja
			400.7.15.5	Perlindungan kesehatan anak
		400.7.16	Kesehatan Tradisional alternatif dan komplementer	
			400.7.16.1	Kesehatan tradisional keterampilan
			400.7.16.2	Kesehatan tradisional ramuan
			400.7.16.3	Kesehatan alternatif dan komplementer
			400.7.16.4	Penapisan dan kemitraan
		400.7.17	Kesehatan kerja dan Olah raga	
			400.7.17.1	Pelayanan kesehatan kerja
			400.7.17.2	Kapasitas kerja
			400.7.17.3	Lingkungan kerja
			400.7.17.4	Kemitraan kesehatan kerja
			400.1.1.1	Kesehatan perkotaan
			400.7.17.6	Kesehatan olahraga
		400.7.18	Obat Publk dan perbekalan kesehatan	
			400.7.18.1	Harga obat publik
			400.7.18.2	Pengadaan obat
			400.7.18.3	Perbekalan kesehatan
		400.7.19	Produksi dan distribusi alat kesehatan	
			400.7.19.1	Alat kesehatan
			400.7.19.2	Produsen dan distributor alat kesehatan dan obat
			400.7.19.3	Produk diagnostik in vitro dan perbekalan kesehatan rumah tangga
		400.7.20	Kefarmasian	
			400.7.20.1	Pelayanan kefarmasian
			400.7.20.2	Farmasi klinis
			400.7.20.3	Farmasi Komunitas
			400.7.20.4	Penggunaan obat rasional
		400.7.21	Produksi dan distribusi kefarmasian	
			400.7.21.1	Obat tradisional
			400.7.21.2	Kosmetik dan makanan
			400.7.21.3	Narkotika, psikotropika, prekursor farmasi dan sediaan farmasi khusus
			400.7.21.4	Kemandirian obat dan bahan baku obat
		400.7.22	Surat Keterangan, Sertifikasi dan Perijinan	

			400.7.22.1	Surat keterangan
			400.7.22.2	Sertifikasi dan perijinan
		400.7.23	Penanggulangan Krisis Kesehatan	
			400.7.23.1	Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan
			400.7.23.2	Tanggap darurat dan pemulihan
			400.7.23.3	Pemantauan dan informasi
			400.7.23.4	Penanggulangan krisis kesehatan dalam bidang pengendalian penyakit dan penyehatan
			400.7.23.5	Pelayanan kesehatan reproduksi situasi bencana
		400.7.24	Pengembangan dan Jaminan Kesehatan	
			400.7.24.1	Tersedianya data NHA setiap tahun
			400.7.24.2	Tersedianya dokumen teknis penguatan pelaksanaan JKN
		400.7.25	Intelegensia Kesehatan	
			400.7.25.1	Pemeliharaan dan peningkatan kemampuan inteligensia kesehatan
			400.7.25.2	Penanggulangan masalah inteligensia kesehatan
		400.7.26	Kesehatan Haji	
			400.7.26.1	Pelayanan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan haji
			400.7.26.2	Peningkatan kesehatan dan pengendalian faktor risiko kesehatan haji
		400.7.27	Promosi Kesehatan	
			400.7.27.1	Sarana Promosi Kesehatan
			400.7.27.2	Pembinaan advokasi dan kemitraan serta pemberdayaan peran
			400.7.27.3	Pengembangan pesan promosi kesehatan
			400.7.27.4	400.7.27.4 Hari Kesehatan
		400.7.28	Data dan Informasi	

			400.7.28.1	Statistik kesehatan
			400.7.28.2	Analisis dan diseminasi informasi
			400.7.28.3	Pengembangan sistem informasi dan bank data kesehatan
		400.7.29	Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen	
			400.7.29.1	Penilaian obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik
			400.7.29.2	Standardisasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen
			400.7.29.3	Inspeksi dan sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen
			400.7.29.4	Obat Asli Indonesia
		400.7.30	Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	
			400.7.30.1	Penilaian keamanan pangan
			400.7.30.2	Standardisasi produk pangan
			400.7.30.3	Inspeksi dan sertifikasi produk pangan
			400.7.30.4	Surveilan dan penyuluhan keamanan pangan
			400.7.30.5	Pengawasan produk dan bahan berbahaya
		400.7.31	Rekam Medis	
	400.8	AGAMA DAN KEPERCAYAAN		
		400.8.1	Kebijakan di bidang Agama dan Kepercayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		400.8.2	Fasilitasi	
			400.8.2.1	Data Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Prov/Kab/Kota
			400.8.2.2	Pelaksanaan Kerukunan Umat Beragama dan Kepercayaan
			400.8.2.3	Pelestarian Nilai-Nilai Keagamaan dan Kepercayan

			400.8.2.4	Kasus Keagamaan
			400.8.2.5	Kasus Aliran Keagamaan
		400.8.3	Pembinaan Kepercayaan Kepada Tuhan YME	
			400.8.3.1	Kelembagaan dan kepercayaan
			400.8.3.2	Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama
			400.8.3.3	Komunitas Kepercayaan
			400.8.3.4	Pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional
			400.8.3.5	Lingkungan Budaya dan Pranata Sosial
	400.9	SOSIAL		
		400.9.1	Kebijakan di bidang Sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		400.9.2	Kesejahteraan Sosial Anak	
			400.9.2.1	Kesejahteraan sosial anak balita
			400.9.2.2	Kesejahteraan sosial anak terlantar
			400.9.2.3	Kesejahteraan sosial anak berhadapan dengan hukum
			400.9.2.4	Kesejahteraan sosial anak dengan kecatatan
			400.9.2.5	Kesejahteraan sosial anak yang membutuhkan perlindungan khusus
		400.9.3	Rehabilitasi Sosial	
			400.9.3.1	Rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan tubuh dan bekas penderita penyakit kronis, netra dan rungu wicara, mental
			400.9.3.2	Kelembagaan dan advokasi social
			400.9.3.3	Asistensi dan pemeliharaan kesejahteraan social
		400.9.4	Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial	
			400.9.4.1	Gelandangan, pengemis dan pemulung
			400.9.4.2	Tuna susila dan korban traffking perempuan

			400.9.4.3	Warga binaan lembaga pemasyarakatan meliputi penyiapan, reintegrasi
			400.9.4.4	Pelayanan sosial orang dengan HIV / AIDS dan kelompok minoritas
		400.9.5	Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA	
		400.9.6	Pelayanan sosial lanjut usia	
			400.9.6.1	Pelayanan sosial dalam dan luar panti
			400.9.6.2	Pengembangan kelembagaan meliputi pembinaan lembaga, kerjasama lembaga
			400.9.6.3	Advokasi dan pelayanan sosial kedaruratan
		400.9.7	Pengumpulan dan Pengelolaan sumber dana bantuan sosial	
		400.9.8	Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran	
		400.9.9	Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	
			400.9.9.1	Ketahanan sosial masyarakat meliputi keserasian sosial, penguatan Sumber Daya
			400.9.9.2	Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial
			400.9.9.3	Pemulihan sosial meliputi penguatan sosial, reintegrasi sosial
			400.9.9.4	Kerjasamameliputi kerjasama pemerintah, kerjasama non pemerintah
		400.9.10	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	
			400.9.10.1	Kesiapsiagaan dan mitigasi
			400.9.10.2	Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial
			400.9.10.3	Pemulihan sosial dan penguatan sosial
			400.9.10.4	Kerjasama
		400.9.11	Jaminan Sosial	

			400.9.11.1	Seleksi dan vrifikasi
			400.9.11.2	Asuransi kesejahteraan sosial meliputi kelembagaan, pengelolaan premi
			400.9.11.3	Bantuan langsung dan tunjangan berkelanjutan meliputi pendampingan dan penyaluran
			400.9.11.4	Kerjasama
		400.9.12	Pemberdayaan keluarga dan kelembagaan Sosial	
			400.9.12.1	Ketahanan keluarga
			400.9.12.2	Asistensi keluarga dan pemberdayaan perempuan
			400.9.12.3	Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan organisasi sosial
			400.9.12.4	Kemitraan dunia usaha
			400.9.12.5	Karang taruna meliputi kelembagaan, pengembangan kapasitas
		400.9.13	Pemberdayaan komunitas adat terpencil	
			400.9.13.1	Persiapan pemberdayaan
			400.9.13.2	Pemberdayaan sumber daya manusia
			400.9.13.3	Penggalian dan pengembangan potensi
			400.9.13.4	Keserasian dan penguatan komunitas adat terpencil
			400.9.13.5	Kerjasama kelembagaan
		400.9.14	Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan	
			400.9.14.1	Identifikasi dan analisis
			400.9.14.2	Pengembangan kapasitas
			400.9.14.3	Penataan sosial lingkungan kumuh
			400.9.14.4	Advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas
			400.9.14.5	Bantuan Langsung
			400.9.14.6	Kerjasama Kelembagaan
		400.9.15	Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	
			400.9.15.1	Penghargaan dan kesejahteraan keluarga

				pahlawan
			400.9.15.2	Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan
			400.9.15.3	Pengembangankesetiakawanan sosial
			400.9.15.4	Pengelolaan taman makam pahlawan
	400.10	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA		
		400.10.1	Kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		400.10.2	Pemerintahan Desa dan Kelurahan	
			400.10.2.1	Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan
			400.10.2.2	Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
			400.10.2.3	Fasilitasi Permusyawaratan Desa
			400.10.2.4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
			400.10.2.5	Pengembangan Kapasitas Desa
		400.10.3	Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat	
			400.10.3.1	Lembaga Masyarakat
			400.10.3.2	Pembangunan Partisipatif
			400.10.3.3	Pendataan Potensi Masyarakat
			400.10.3.4	Pengembangan Kawasan Perdesaan
			400.10.3.5	Pelatihan Masyarakat
		400.10.4	Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat	
			400.10.4.1	Budaya Nusantara
			400.10.4.2	Pemberdayaan Perempuan
			400.10.4.3	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
			400.10.4.4	Kesejahteraan Sosial
			400.10.4.5	Tenaga Kerja Perdesaan
		400.10.5	Usaha Ekonomi Masyarakat	
			400.10.5.1	Usaha Pertanian dan Pangan
			400.10.5.2	Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam
			400.10.5.3	Produksi dan Pemasaran

			400.10.5.4	Usaha Ekonomi dan Keluarga
			400.10.5.5	Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal
		400.10.6	Sumberdaya Alam dan Teknologi TepatGuna Perdesaan	
			400.10.6.1	Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan
			400.10.6.2	Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Perdesaan
			400.10.6.3	Fasilitasi Prasarana dan Sarana Perdesaan
			400.10.6.4	Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Perdesaan
			400.10.6.5	Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Perdesaan
		400.10.7	Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)	
	400.11	PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN		
		400.11.1	Kebijakan di bidang Pertamanan dan Pemakaman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		400.11.2	Pertamanan	
			400.11.2.1	Perencanaan Pertamanan
			400.11.2.2	Taman Kota
			400.11.2.3	Tata Hias dan Ornamen Kota
		400.11.3	Pemakaman	
			400.11.3.1	Perencanaan Pemakaman
			400.11.3.2	Pemakaman
			400.11.3.3	Pelayanan Pemakaman
		400.11.4	Jalur Hijau	
			400.11.4.1	Perencanaan Jalur Hijau
			400.11.4.2	Jalur Hijau Jalan
			400.11.4.3	Jalur Hijau Penyempurna dan Tepian air
		400.11.5	Peran Serta Masyarakat	
		400.11.6	Pengawasan dan Penindakan	
		400.11.7	Pengelolaan Data	
		400.11.8	Evaluasi dan Pelaporan	
	400.12	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		
		400.12.1	Kebijakan di bidang Kependudukan dan	

			Catatan Sipil yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.	
		400.12.2	Pendaftaran Penduduk	
			400.12.2.1	Identitas Penduduk
			400.12.2.2	Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah NKRI
			400.12.2.3	Pindah Datang Penduduk Antar Negara
			400.12.2.4	Pendataan Penduduk Rentan
			400.12.2.5	Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
		400.12.3	Pencatatan Sipil	
			400.12.3.1	Kelahiran dan Kematian
			400.12.3.2	Perkawinan dan Perceraian
			400.12.3.3	PengangkatanPengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan
			400.12.3.4	Pencatatan Kewarganegaraan
			400.12.3.5	Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
		400.12.4	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
			400.12.4.1	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
			400.12.4.2	Kelembagaan Informasi Administrasi Kependudukan
			400.12.4.3	Pengelolaan data Administrasi Kependudukan
			400.12.4.4	Penyajian dan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan
			400.12.4.5	Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
		400.12.5	Pengembangan Kebijakan Kependudukan	
			400.12.5.1	Kuantitas Penduduk
			400.12.5.2	Kualitas Penduduk
			400.12.5.3	Mobilitas Penduduk
			400.12.5.4	Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk
			400.12.5.5	Pengembangan Wawasan

				Kependudukan, Monitoring dan Evaluasi
		400.12.6	Penyerasian Kependudukan	
			400.12.6.1	Indikator Kependudukan
			400.12.6.2	Proyeksi Penduduk
			400.12.6.3	Perencanaan Kependudukan
			400.12.6.4	Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Non Pemerintah
			400.12.6.5	Pelaksanaan Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Pemerintah
	400.13	KELUARGA BERENCANA		
		400.13.1	Kebijakan di bidang Keluarga Berencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		400.13.2	Analisis pengaduan kebijakan pengendalian penduduk	
			400.13.2.1	Pengumpulan dan pengolahan data
			400.13.2.2	400.13.2.2 Evaluasi dan pelaporan
		400.13.3	Fasilitas pengaduan kebijakan pengendalian penduduk	
			400.13.3.1	Penyiapan fasilitas
			400.13.3.2	Evaluasi dan pelaporan
		400.13.4	Profil dan proyeksi penduduk	
			400.13.4.1	Data profil dan proyeksi penduduk
			400.13.4.2	Evaluasi data profildan proyeksi penduduk
		400.13.5	Penetapan parameter pengendalian penduduk	
			400.13.5.1	Penetapan sasaran parameter
			400.13.5.2	Evaluasi sasaran parameter
		400.13.6	Pemanfaatan perencanaan pengendalian penduduk	
			400.13.6.1	Pemanfaatan profil dan proyeksi
			400.13.6.2	Pemanfaatan parameter
		400.13.7	Pengembangan Sistem	
			400.13.7.1	Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Formal
			400.13.7.2	Pengembangan Sistem

				Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
		400.13.8	Pengembangan Materi	
			400.13.8.1	Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Formal
			400.13.8.2	Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
		400.13.9	Monitoring dan Evaluasi	
			400.13.9.1	Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Formal
			400.13.9.2	Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
		400.13.10	Analisis Sosial	
		400.13.11	Analisis Ekonomi	
		400.13.12	Analisis Dampak Politik, Pertahanan dan Keamanan	
		400.13.13	Analisis DayaDukung dan DayaTampung Lingkungan	
		400.13.14	Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah	
		400.13.15	Jaminan pelayanan dan penyediaan sarana keluarga berencana	
		400.13.16	Kualitas pelayanan keluarga berencana pemerintah	
			400.13.16.1	Standarisasi
			400.13.16.2	Monitoring
		400.13.17	Bina keluarga berencana rumah sakit dan klinik swasta	
		400.13.18	Jaminan dan ketersediaan saranakeluarga berencana swasta	
		400.13.19	Kualitas pelayanan keluarga berencana swasta	
			400.13.19.1	Standarisasi
			400.13.19.2	Monitoring
		400.13.20	Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana jalur wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan	
			400.13.20.1	Peningkatan akses pelayanan keluarga
			400.13.20.2	Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah

				tertinggal, terpencil, dan perbatasan
		400.13.21	Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan	
			400.13.21.1	Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan
			400.13.21.2	Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan
		400.13.22	Kesertaan keluarga berencana pria	
			400.13.22.1	Peningkatan akses keluarga berencana pria
			400.13.22.2	Peningkatan partisipasi keluarga berencana pria
		400.13.23	Kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak	
		400.13.24	Pencegahan PMS dan HIV/AIDS	
		400.13.25	Pencegahan kanker alat reproduksi dan penanggulangan infertilitas	
		400.13.26	Pelembagaan bina keluarga Balita dan anak	
			400.13.26.1	Pengembangan kelompok bina keluarga Balita dan anak
			400.13.26.2	Pengembangan kemitraan bina keluarga dan anak
		400.13.27	Monitoring dan evaluasi bina keluarga Balita dan anak	
			400.13.27.1	Monitoring bina keluarga Balita dan anak
			400.13.27.2	Evaluasi dan pelaporan bina keluarga Balita dan anak
		400.13.28	Pelembagaan bina ketahanan remaja	
			400.13.28.1	Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur pendidikan
			400.13.28.2	Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur masyarakat
		400.13.29	Monitoring dan evaluasi bina ketahanan remaja	
			400.13.29.1	Monitoring bina

				ketahanan remaja
			400.13.29.2	Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan remaja
		400.13.30	Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan	
			400.13.30.1	Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Lansia
			400.13.30.2	Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Rentan
		400.13.31	Pelembagaan Bina Ketahanan keluarga Lansia dan Rentan	
			400.13.31.1	Pengembangan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
			400.13.31.2	Pengembangan Kemitraan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
			400.13.32 Monitoring dan evaluasi bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan	
			400.13.32.1	Monitoring Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
			400.13.32.2	Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan
		400.13.33	Pengembangan program usaha ekonomi keluarga	
		400.13.34	Peningkatan teknologi dan permodalan usaha ekonomi keluarga	
		400.13.35	Peningkatan manajemen usaha ekonomi keluarga	
			400.13.35.1	Pengembangan administrasi dan keuangan kelompok usaha ekonomi keluarga
			400.13.35.2	Pengembangan pemasaran kelompok usaha ekonomi keluarga
		400.13.36	Monitoring dan evaluasi usaha ekonomi keluarga	
		400.13.37	Pengembangan Program Pusat pelayanan Keluarga Sejahtera	
		400.13.38	Pelembagaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	

			400.13.38.1	Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
			400.13.38.2	PengembanganKemitraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
		400.13.39	Monitoring dan Evaluasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	
			400.13.39.1	Monitoring Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
			400.13.39.2	Evaluasi dan pelaporan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
		400.13.40	Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi	
			400.13.40.1	Perencanaan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi
			400.13.40.2	Evaluasi dan pelaporan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi
		400.13.41	Advokasi dan pencitraan	
		400.13.42	Komunikasi, Informasi dan Edukasi	
			400.13.42.1	Promosi
			400.13.42.2	Sarana produksi media komunikasi
			400.13.42.3	Produk media komunikasi
		400.13.43	Hubungan dengan lembaga pemerintah pusat dan provinsi	
		400.13.44	Hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota	
			400.13.44.1	Pengembangan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota
			400.13.44.2	Penguatan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota
		400.13.45	Hubungan dengan lembaga nonpemerintah	
			400.13.45.1	Pengembangan hubungan dengan lembaga nonpemerintah
			400.13.45.2	Penguatan hubungan

				dengan lembaga nonpemerintah
		400.13.46	Tenaga Lini Lapangan	
			400.13.46.1	Pengembangan tenaga lini lapangan
			400.13.46.2	Monitoring dan evaluasi tenaga lini lapangan
		400.13.47	Institusi Masyarakat Pedesaan	
			400.13.47.1	Pengembangan institusi masyarakat pedesaan
			400.13.47.2	Monitoring dan evaluasi institusi masyarakat pedesaan
		400.13.48	Mekanisme Operasional lini lapangan	
			400.13.48.1	Pengembangan mekanisme operasional lini lapangan
			400.13.48.2	Monitoring dan evaluasi mekanisme operasional lini lapangan
		400.13.49	Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan	
			400.13.49.1	Perumusan pola sistem pencatatan dan pelaporan
			400.13.49.2	Monitoring dan evaluasi sistem pencatatan dan pelaporan
		400.13.50	Pengumpulan dan pengolahan data	
		400.13.51	Analisis dan evaluasi	
			400.13.51.1	Analisis dan evaluasi pengendalian penduduk
			400.13.51.2	Analisis dan evaluasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera
		400.13.52	Sistem aplikasi dan bank data	
			400.13.52.1	Pengembangan sistem aplikasi
			400.13.52.2	Pengelolaan bank data
		400.13.53	Infrastruktur teknologi informasi	
			400.13.53.1	Pengembangan infrastruktur teknologi informasi
			400.13.53.2	Pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi
		400.13.54	Dokumentasi dan penyebarluasan informasi	

			400.13.54.1	Dokumentasi dan perpustakaan
			400.13.54.2	Pengelolaan situs BKKBN dan media konferensi
	400.14	HUBUNGAN MASYARAKAT		
		400.14.1	Keprotokolan	
			400.14.1.1	Penyelenggaraan acara kedinasan (upacara, pelantikan, peresmian, dan jamuan termasuk acara peringatan hari-hari besar)
			400.14.1.2	Buku tamu Keprotokolan
			400.14.1.3	Agenda kegiatan pimpinan daerah
			400.14.1.4	Kunjungan dinas dalam dan luar negeri
		400.14.2	Daftar nama/alamat kantor /pejabat	
		400.14.3	Dokumentasi/ liputan kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan dan peristiwa-peristiwan bidang masing-masing, dalam berbagai media: kertas, foto/ video/ rekaman suara/ multi media	
		400.14.4	Pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan	
			400.14.4.1	Kliping koran
			400.14.4.2	Brosur /Leaflet/poster /plakat
			400.14.4.3	Pengumuman /pemberitaan
		400.14.5	Hubungan antar lembaga dan Pemerintahan Daerah	
			400.14.5.1	Hubungan antar lembaga pemerintah
			400.14.5.2	Hubungan dengan organisasi sosial / LSM
			400.14.5.3	Hubungan dengan perusahaan
			400.14.5.4	Hubungan dengan Perguruan Tinggi/ sekolah, termasuk magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/ Praktek Kerja Lapang (PKL)
			400.14.5.5	Forum Kehumasan
			400.14.5.6	Hubungan dengan Media

				Massa
		400.14.6	Dengar pendapat/hearing DPRD	
		400.14.7	Bahan/materi pidato/sidang Muspida Provinsi/Kota/Kabupaten	
		400.14.8	Penerbitan Majalah, buletin, koran dan jurnal	
		400.14.9	Publikasi melalui media cetak maupun elektronik	
		400.14.10	Pameran/sayemara/lomba/festival, pembuatan spanduk dan iklan	
		400.14.11	Penghargaan/tanda kenang-kenangan	
		400.14.12	Ucapan Terimakasih, Ucapan Selamat, Bela Sungkawa, Permohonan Maaf	
500	PEREKONOMIAN			
	500.1	KETAHANAN PANGAN		
		500.1.1	Kebijakan di bidang Ketahanan Pangan yang dilakukan Pemerintah Daerah	
		500.1.2	Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	
			500.1.2.1	Ketersediaan Pangan
			500.1.2.2	Akses Pangan
			500.1.2.3	Kerawanan Pangan
		500.1.3	Distribusi dan Cadangan Pangan	
			500.1.3.1	Distribusi Pangan
			500.1.3.2	Harga Pangan
			500.1.3.3	Cadangan Pangan
		500.1.4	Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan	
			500.1.4.1	Konsumsi Pangan
			500.1.4.2	Penganekaragaman Pangan
			500.1.4.3	Keamanan Pangan Segar
		500.1.5	Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan	
			500.1.5.1	Dewan Ketahanan Pangan
			500.1.5.2	Penghargaan Ketahan Pangan
		500.1.6	Swasembada Pangan (Kearifan Lokal)	
		500.1.7	Bimbingan Teknis	
		500.1.8	Evaluasi	
	500.2	PERDAGANGAN		
		500.2.1	Kebijakan di bidang Perdagangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		500.2.2	Perdagangan Dalam Negeri	
			500.2.2.1	Bina Usaha Kelembagaan dan Penguatan Usaha
			500.2.2.2	Bisa Usaha Jasa

				Perdangan
			500.2.2.3	Bina Usaha Dagang Asing dan Keagenan
			500.2.2.4	Informasi Perusahaan
			500.2.2.5	Pelaku Pasar
			500.2.2.6	Iklim Usaha dan Bimbingan Teknis Usaha Dagang Kecil Menengah
			500.2.2.7	Fasilitasi Usaha dan Pemasaran Usaha Dagang Kecil Menengah
			500.2.2.8	Pengembangan Produk Lokal
			500.2.2.9	Pencitraan Produk Dalam Negeri
			500.2.2.10	Pengembangan Sarana Distribusi
			500.2.2.11	Pengelolaan Sarana Distribusi
			500.2.2.12	Kerjasama Pengembangan Sistem Logistik
			500.2.2.13	Informasi danBimbingan Teknis Penyedia Jasa Logistik
			500.2.2.14	Informasi Pasar
			500.2.2.15	Informasi Hasil Industri
			500.2.2.16	Barang Strategis
			500.2.2.17	Bahan Pokok Agro
		500.2.3	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	
			500.2.3.1	Kelembagaan dan informasi standar
			500.2.3.2	Kerjasama Standarisasi
			500.2.3.3	Perumusan dan penerapan standar
			500.2.3.4	Tata usaha
			500.2.3.5	Kerjasama, informasi, dan publikasi
			500.2.3.6	Analisa penyelenggaraan perlindungan konsumen
			500.2.3.7	Bimbingan konsumenb dan pelaku usaha
			500.2.3.8	Fasilitas kelembagaan
			500.2.3.9	Produk pertambangan dan aneka industri
			500.2.3.10	Produk pertanian, kimia dan kehutanan
			500.2.3.11	Jasa

			500.2.3.12	Kerjasama
			500.2.3.13	Sarana dan Kerjasama
			500.2.3.14	Kelembagaan dan dan penilaian
			500.2.3.15	UTTP dan Standar Ukuran
			500.2.3.16	Pengawasan
			500.2.3.17	Balai pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran
			500.2.3.18	Balai Pengujian UTTP
		500.2.4	Perdagangan Berjangka Komoditi	
			500.2.4.1	Pengkajian pasar
			500.2.4.2	Pengawasan Transaksi
			500.2.4.3	Pengawasan Keuangan dan Audit
			500.2.4.4	Pengkajian pasar
			500.2.4.5	Pengembangan Pasar
			500.2.4.6	Sistem informasi
			500.2.4.7	Pembinaan pasar lelang dan sistem resi gudang
			500.2.4.8	Pengawasan pasar lelang
			500.2.4.9	Pengawasan sistem gudang
		500.2.5	Bimbingan Teknis	
		500.2.6	Evaluasi	
	500.3	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH		
		500.3.1	Kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		500.3.2	Kelembagaan Koperasi dan UKM	
			500.3.2.1	Organisasi dan Badan Hukum Koperasi
			500.3.2.2	Tata Laksana Koperasi dan UKM
			500.3.2.3	Keanggotaan Koperasi
			500.3.2.4	Pengendalian dan Akuntabilitas
		500.3.3	Produksi	
			500.3.3.1	Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
			500.3.3.2	Kehutanan dan Perkebunan
			500.3.3.3	Perikanan dan Peternakan
			500.3.3.4	Industri Kerajinan dan Pertambangan
			500.3.3.5	Ketenagalistrikan dan

				Aneka Usaha
		500.3.4	Pembiayaan	
			500.3.4.1	Program Pendanaan
			500.3.4.2	Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam
			500.3.4.3	Urusan Permodalan
			500.3.4.4	Asuransi dan Jasa Keuangan
			500.3.4.5	Pembiayaan dan Penjaminan Kredit
			500.3.4.6	Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM (LPDB)
		500.3.5	Pemasaran dan Jaringan Usaha	
			500.3.5.1	Perdagangan Dalam Negeri
			500.3.5.2	Ekspor dan Impor
			500.3.5.3	Sarana dan Prasarana Pemasaran
			500.3.5.4	Kemitraan dan Jaringan Usaha
			500.3.5.5	Informasi dan Publikasi Bisnis
			500.3.5.6	Lembaga Layanan Pemasaran LLP Koperasi dan UKM
		500.3.6	Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			500.3.6.1	Pengembangan Kewirausahaan
			500.3.6.2	Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM
			500.3.6.3	Peran Serta Masyarakat
			500.3.6.4	Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM
			500.3.6.5	Advokasi
		500.3.7	Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha	
			500.3.7.1	Produktifitas dan Mutu
			500.3.7.2	Restrukturisasi Usaha
			500.3.7.3	Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB)
			500.3.7.4	Fasilitasi Investasi UKMK
			500.3.7.5	Pengembangan Sarana Bisnis
		500.3.8	Pengkajian Sumber Daya UKMK	
			500.3.8.1	Penelitian Koperasi

			500.3.8.2	Penelitian UKM
			500.3.8.3	Penelitian Sumber Daya
			500.3.8.4	Pengembangan Perkaderan UMK
		500.3.9	Kerja Sama Hubungan Antar Lembaga	
		500.3.10	Pedagang Kaki Lima (PKL)	
			500.3.10.1	Peraturan Perundang-Undangan
			500.3.10.2	Sarana dan Prasarana
		500.3.11	Monitoring dan Evaluasi	
	500.4	KEHUTANAN		
		500.4.1	Kebijakan di bidang Kehutanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		500.4.2	Penyuluhan	
			500.4.2.1	Program Kerja Penyuluhan
			500.4.2.2	Materi Penyuluhan
			500.4.2.3	Program Penyuluhan
			500.4.2.4	Sarana Penyuluhan
			500.4.2.5	Pengembangan Tenaga Penyuluhan
			500.4.2.6	Pelaksanaan Penyuluhan
			500.4.2.7	Pemberdayaan Masyarakat
			500.4.2.8	Deseminasi
			500.4.2.9	Evaluasi, dan Laporan
		500.4.3	Planologi Kehutanan	
			500.4.3.1	Perencanaan Makro Kawasan Hutan
			500.4.3.2	Penataan Ruang Kawasan Hutan
			500.4.3.3	Statistik dan Jaringan Komunikasi Data Kehutanan
			500.4.3.4	Pengukuhan dan Penataaan Kawasan Hutan
			500.4.3.5	Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan
			500.4.3.6	Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan
			500.4.3.7	Inventarisasi Sumber Daya Hutan
			500.4.3.8	Pemantauan Sumber Daya Hutan

			500.4.3.9	Pemetaan Sumber Daya Hutan
			500.4.3.10	Jaringan Data Spasial
			500.4.3.12	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan
			500.4.3.13	Informasi Penggunaan Kawasan Hutan
			500.4.3.14	Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan
			500.4.3.15	Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan
			500.4.3.16	Informasi Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan
		500.4.4	Bina Usaha Kehutanan	
			500.4.4.1	Data areal HPH /HTI/IUPHHK
			500.4.4.2	SK HPH/HTI/IUPHHK
			500.4.4.3	Kerjasama
			500.4.4.4	Pembatalan/Penolakan
			500.4.4.5	Perpanjangan
			500.4.4.6	Modal dan Peralatan
			500.4.4.7	Investasi Industri
			500.4.4.8	Peralatan
			500.4.4.9	Tenaga Kerja
			500.4.4.10	Pemegang Saham
			500.4.4.11	Neraca Perusahaan
			500.4.4.12	Rencana Karya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)
			500.4.4.13	Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH)
			500.4.4.14	Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan (RKT)
			500.4.4.15	Rencana Karya Lima Tahun Pengusahaan Hutan (RKL)
			500.4.4.16	Target Produksi RKT dan Beban Kerja
			500.4.4.17	Produksi Kayu
			500.4.4.18	Produksi non kayu
			500.4.4.19	Industri Kayu HPH/HTI/IUPHHK

			500.4.4.20	Industri Kayu Non HPH/HTI/IUPHHK
			500.4.4.21	Industri Non Kayu
			500.4.4.22	Hutan Tanaman Industri Pulp
			500.4.4.23	Hutan Tanaman Industri Pertukangan
			500.4.4.24	Pelanggaran dan Sanksi
			500.4.4.25	Pemblokiran
			500.4.4.26	Denda
			500.4.4.27	Pencabutan Areal HPH/HTI/IUPHHK
			500.4.4.28	500.4.4.28 Pola Pemanfaatan Hutan Produksi
			500.4.4.29	Penataan Pemanfaatan Hutan Produksi
			500.4.4.30	Informasi Sumber Daya Hutan Produksi
			500.4.4.31	Pengembangan Investasi Usaha
			500.4.4.32	Penyiapan Pemanfaatan Hutan Alam
			500.4.4.33	Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam/Rencana Kerja Usaha Produksi Hasil
			500.4.4.34	Produksi Hutan Alam
			500.4.4.35	Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Alam
			500.4.4.36	Pengembangan Hutan Tanaman Industri
			500.4.4.37	Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat
			500.4.4.38	Pengembangan Rencana Kerja dan Produksi Hutan Tanaman/Rencana Kerja Usaha Produksi
			500.4.4.39	Penilaian Kinerja Pengembangan Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman
			500.4.4.40	Pembiayaan Hutan Tanaman
			500.4.4.41	Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil Hutan
			500.4.4.42	Peredaran Hasil Hutan
			500.4.4.43	Pengukuran dan

				Pengujian Hasil Hutan
			500.4.4.44	Penertiban Peredaran Hasil Hutan
			500.4.4.45	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan
			500.4.4.46	Pengendalian Bahan Baku dan Industri Primer Hasil Hutan
			500.4.4.47	Penilaian Kinerja Industri dan Pemasaran Hasil Hutan
			500.4.4.48	Pembinaan HPH/HTI/IUPHHK
			500.4.4.49	Pembinaan TPTI / TPTJ / Silvikultur
		500.4.5	Standardisasi dan Lingkungan	
			500.4.5.1	Standardisasi
			500.4.5.2	Sarana Pengujian Hasil Hutan
			500.4.5.3	Pengembangan
			500.4.5.4	Pemasaran Hasil Hutan
			500.4.5.5	Pengendalian Lingkungan
			500.4.5.6	Angkutan Hasil Hutan
			500.4.5.7	Tanda Pengenal Perusahaan Tata Usaha Hasil Hutan
			500.4.5.8	Legalitas Tata Usaha Hasil Hutan
			500.4.5.9	Palu Tok Kualitas Tata Usaha Hasil Hutan
			500.4.5.10	Pass Angkutan Hasil Hutan
			500.4.5.11	Sertifikat Ekspor Hasil Hutan
		500.4.6	Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam	
			500.4.6.1	Flora dan Fauna yang Dilindungi
			500.4.6.2	Flora dan Fauna yang Tidak Dilindungi
			500.4.6.3	Lembaga Konservasi/Kebun Binatang
			500.4.6.4	Konvensi Keanekaragaman Hayati
			500.4.6.5	Kawasan Konservasi
			500.4.6.6	Pengamanan Hutan
			500.4.6.7	Program dan Evaluasi

				Penyidikan dan Perlindungan
			500.4.6.8	Penyidikan dan Perlindungan Wilayah Hutan
			500.4.6.9	Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
			500.4.6.10	Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam
			500.4.6.11	Bina Cinta Alam
			500.4.6.12	Kader Konservasi Sumber Daya Alam
			500.4.6.13	Data organisasi pencinta alam dan kader konservasi SDA
		500.4.7	Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial	
			500.4.7.1	Pengelolaan Benih
			500.4.7.2	Kebun Benih
			500.4.7.3	Tegakan Benih
			500.4.7.4	Pengadaan Benih
			500.4.7.5	Pengujian dan Penyimpanan Benih
			500.4.7.6	Lalu Lintas Angkutan Benih
			500.4.7.7	Pembibitan
			500.4.7.8	Lalu Lintas Angkutan Benih
			500.4.7.9	Pengembangan Usaha Perbenihan
			500.4.7.10	Pengendalian Peredaran Benih
			500.4.7.11	Rehabilitasi Hutan dan Lahan
			500.4.7.12	Tanaman Reboisasi
			500.4.7.13	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
			500.4.7.14	Perhutanan Sosial
			500.4.7.15	Pengendalian Perladangan
		500.4.8	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	
			500.4.8.1	Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Kehutanan
			500.4.8.2	Monitoring dan Evaluasi Penelitian

			500.4.8.3	Diseminasi
			500.4.8.4	Gelar Teknologi
			500.4.8.5	Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan
	500.5	KELAUTAN DAN PERIKANAN		
		500.5.1	Kebijakan di bidang Kelautan dan Perikanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		500.5.2	Perikanan Tangkap	
			500.5.2.1	Data dan Statistik Perikanan Tangkap
			500.5.2.2	Rancang Bangun dan Kelaikan Kapal Perikanan
			500.5.2.3	Rancang Bangun dan Kelaikan Alat Tangkap Ikan
			500.5.2.4	Pendaftaran Kapal Perikanan
			500.5.2.5	Pengawakan Kapal dan Ketenagakerjaan Perikanan
			500.5.2.6	Perbantuan dan Evaluasi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
			500.5.2.7	Alokasi Usaha Penangkapan Ikan
			500.5.2.8	Tata Pengusahaan Penangkapan Ikan
			500.5.2.9	Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan
			500.5.2.10	Pelayanan Dokumen Penangkapan Ikan
			500.5.2.11	Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan
			500.5.2.12	Kelembagaan Usaha Penangkapan
			500.5.2.13	Investasi dan Permodalan Usaha
			500.5.2.14	Kenelayanan
			500.5.2.15	Pembinaan Pengelolaan Usaha
			500.5.2.16	Pemantauan dan Evaluasi Usaha

				Penangkapan Ikan
		500.5.3	Perikanan Budidaya	
			500.5.3.1	Potensi Lahan dan Air
			500.5.3.2	Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar
			500.5.3.3	Pengelolaan Induk Perbenihan ikan air tawar
			500.5.3.4	Perbenihan Skala Kecil
			500.5.3.5	Informasi dan Distribusi Pembenihan
			500.5.3.6	Budidaya Air Tawar
			500.5.3.7	Budidaya Ikan Hias
			500.5.3.8	Sertifikasi Budidaya Perikanan
			500.5.3.9	Data dan Statistik Perikanan Budidaya
			500.5.3.10	Hama dan Penyakit Ikan
			500.5.3.11	Perlindungan Lingkungan Budidaya
			500.5.3.12	Investasi dan Permodalan Usaha Budidaya
			500.5.3.13	Kewirausahaan Budidaya
			500.5.3.14	Pelayanan Usaha Budidaya
			500.5.3.15	Kelembagaan dan Ketenagaakerjaan
			500.5.3.16	Promosi Usaha dan Budaya
		500.5.4	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
			500.5.4.1	Standarisasi Pengolahan Hasil
			500.5.4.2	Pengembangan Produk
			500.5.4.3	Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
			500.5.4.4	Industri Pengolahan
			500.5.4.5	Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil
			500.5.4.6	Standarisasi Pengembangan Produk Non Konsumsi
			500.5.4.7	Promosi dan Jaringan Ikan Hias
			500.5.4.8	Pengembangan Industri
			500.5.4.9	Sarana dan Prasarana Pengembangan Produk Non Konsumsi

			500.5.4.10	Kelembagaan Pemasaran Dalam Negeri
			500.5.4.11	Analisis dan Informasi Pasar Dalam Negeri
			500.5.4.12	Jaringan Distribusi dan Kemitraan Pemasaran Dalam Negeri
			500.5.4.13	Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Dalam Negeri
			500.5.4.14	Sarana dan Prasarana Pemasaran Dalam Negeri
			500.5.4.15	Kelembagaan Pemasaran Luar Negeri
			500.5.4.16	Analisis dan Informasi Pemasaran Luar Negeri
			500.5.4.17	Pengembangan Ekspor
			500.5.4.18	Pengembangan Impor
			500.5.4.19	Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Luar Negeri
			500.5.4.20	Pelayanan Usaha
			500.5.4.21	Kemitraan Usaha
			500.5.4.22	Ketenagakerjaan Pengolahan dan Pemasaran
			500.5.4.23	Investasi dan Permodalan
			500.5.4.24	Informasi dan Promosi
		500.5.5	Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	
			500.5.5.1	Rencana Tata Ruang Laut Nasional dan Perairan Yurisdiksi
			500.5.5.2	Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah I
			500.5.5.3	Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah II
			500.5.5.4	Informasi dan Evaluasi Spasial
			500.5.5.5	Jejaring, Data, dan Informasi Konservasi
			500.5.5.6	Konservasi Wawasan
			500.5.5.7	Konservasi Jenis Ikan
			500.5.5.8	Pemanfaatan Kawasan dan Jenis Ikan
			500.5.5.9	Mitigasi Bencana Lingkungan
			500.5.5.10	Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan
			500.5.5.11	Penanggulangan Pencemaran Sumber

				Daya Pesisir dan Laut
			500.5.5.12	Rehabilitasi dan Reklamasi
			500.5.5.13	Identifikasi Pulau-Pulau Terkecil
			500.5.5.14	Pengelolaan Ekosistem Pulau-Pulau Terkecil
			500.5.5.15	Investasi dan Promosi Pulau-Pulau Terkecil
			500.5.5.16	Sarana dan Prasarana Pulau-Pulau Terkecil
			500.5.5.17	Akses Permodalan
			500.5.5.18	Akses Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
			500.5.5.19	Sosial Budaya Masyarakat
			500.5.5.20	Pengembangan Usaha
		500.5.6	Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	
			500.5.6.1	Pengawasan Penangkapan Wilayah Barat
			500.5.6.2	Pengawasan Penangkapan Wilayah Timur
			500.5.6.3	Pengawasan Pengangkutan, Pengolahan dan Pemasaran
			500.5.6.4	Pengawasan Usaha Budidaya
			500.5.6.5	Pengawasan Ekosistem Perairan dan Kawasan Konservasi
			500.5.6.6	Pengawasan Pencemaran Perairan
			500.5.6.7	Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Terkecil
			500.5.6.8	Pengawasan Jasa Kelautan dan Sumber Daya NonHayati
			500.5.6.9	Logistik dan Operasional Wilayah Barat
			500.5.6.10	Logistik dan Operasional Wilayah Timur
			500.5.6.11	Perawatan Kapal

				Pengawas
			500.5.6.12	Pengawakan Kapal Pengawas
			500.5.6.13	Sistem Pemantauan
			500.5.6.14	Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan
			500.5.6.15	Pemantauan Sumber Daya Perikanan
			500.5.6.16	Pengembangan Infrastruktur Pengawasan
			500.5.6.17	Penyidikan
			500.5.6.18	Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal
			500.5.6.19	Kerja Sama Penegakan Hukum dan Fasilitas PPNS Perikanan
			500.5.6.20	Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Pelanggaran
		500.5.7	Karantina Ikan	
			500.5.7.1	Pemeriksaan Ikan
			500.5.7.2	Penahanan
			500.5.7.3	Pengasingan
			500.5.7.4	Pengamatan
			500.5.7.5	Pengakuan
			500.5.7.6	Penolakan
			500.5.7.7	Pemusnahan
			500.5.7.8	Persyaratan lalu Lintas Pemasukan
			500.5.7.9	Persyaratan lalu Lintas Pengeluaran
			500.5.7.10	Permohonan Sertifikat
			500.5.7.11	Pemasukan Formulir
			500.5.7.12	Pemasukan Sertifikat
			500.5.7.13	Evaluasi dan Monitoring Sertifikat
			500.5.7.14	Surat Perintah
			500.5.7.15	Rekomendasi
			500.5.7.16	Penutupan Suatu Area
			500.5.7.17	Pelanggaran Lalu Lintas Ikan
			500.5.7.18	Pengawasan Peraturan Perkarantinaan
			500.5.7.19	Pengawasan Pelaksanaan Operasional
			500.5.7.20	Instalasi Karantina

				Sementara
			500.5.7.21	Lokasi Karantina
	500.6	PERTANIAN		
		500.6.1	Kebijakan di bidang Pertanian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		500.6.2	Perlindungan hortikultura	
			500.6.2.1	Perlindungan Tanaman Buah
			500.6.2.2	Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat
			500.6.2.3	Perlindungan Tanaman Florikultura
			500.6.2.4	Dampak iklim dan Persyaratan Teknis
		500.6.3	Perbenihan Hortikultura	
			500.6.3.1	Penilaian Varietas
			500.6.3.2	Pengawasan Mutu Benih
			500.6.3.3	Budidaya dan Pascapanen Florikultura
		500.6.4	Perluasan dan Pengelolaan Lahan	
			500.6.4.1	Basis Data Lahan
			500.6.4.2	Pengendalian Lahan
			500.6.4.3	Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan
			500.6.4.4	Perluasan Kawasan Tanaman Pangan
			500.6.4.5	Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan
		500.6.5	Pengelolaan Air Irigasi	
			500.6.5.1	Pengembangan Sumber Air
			500.6.5.2	Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air
			500.6.5.3	Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup
			500.6.5.4	Kelembagaan
		500.6.6	Pembiayaan Pertanian	
			500.6.6.1	Pembiayaan Program
			500.6.6.2	Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama
			500.6.6.3	Pembiayaan agribisnis
			500.6.6.4	Kelembagaan dan Pemberdayaan agribisnis

		500.6.7	Pupuk Pestisida	
			500.6.7.1	Pupuk Organik dan Pembenah Tanah
			500.6.7.2	Pupuk Anorganik
			500.6.7.3	Pestisida
			500.6.7.4	Pengawasan Pupuk dan Pestisida
		500.6.8	Alat dan Mesin Pertanian	
			500.6.8.1	Pengembangan Alat danMesin Pertanian
			500.6.8.2	Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian
			500.6.8.3	Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian
		500.6.9	Perbenihan Tanaman Pangan	
			500.6.9.1	Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih
			500.6.9.2	Produksi Benih Serealia
			500.6.9.3	Produksi Benih Aneka Kacang dan Umbi
			500.6.9.4	Kelembagaan Benih
		500.6.10	Budidaya Serealia	
			500.6.10.1	Padi Irigasi dan Rawa
			500.6.10.2	Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering
			500.6.10.3	Jagung
			500.6.10.4	Serealia Lain
		500.6.11	Budidaya Aneka Kacang dan Umbi	
			500.6.11.1	Kedelai
			500.6.11.2	Ubi Kayu
			500.6.11.3	Aneka Kacang
			500.6.11.4	Aneka Umbi
		500.6.12	Tanaman Pangan	
			500.6.12.1	Pengeloalan Data Organisasi Pengganggu Tumbuhan
			500.6.12.2	Dampak Perubahan Iklim
			500.6.12.3	Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan
			500.6.12.4	Pengelolaan Pengendalian Hama Tepadu
		500.6.13	Pascapanen Tanaman Pangan	
			500.6.13.1	Padi
			500.6.13.2	Jagung dan Serealia alin

			500.6.13.3	Kedelai dan Aneka Kacang
			500.6.13.4	Aneka Umbi
		500.6.14	Pengolahan Hasil Pertanian	
			500.6.14.1	Tanaman Pangan
			500.6.14.2	Holtikurtura
			500.6.14.3	Perkebunan
			500.6.14.4	Peternakan
		500.6.15	Mutu dan Standariasi	
			500.6.15.1	Standardisasi
			500.6.15.2	Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu
			500.6.15.3	Akreditasi dan Kelembagaan
			500.6.15.4	Kerjasama dan Harmonisasi
		500.6.16	Pengembangan Usaha dan Investasi	
			500.6.16.1	Kemitraan dan Kewirausahaan
			500.6.16.2	Investasi
			500.6.16.3	Promosi Dalam Negeri
			500.6.16.4	Promosi Luar Negeri
		500.6.17	Pemasaran Domestik	
			500.6.17.1	Informasi Pasar
			500.6.17.2	Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga
			500.6.17.3	Sarana dan Kelembagaan Pasar
			500.6.17.4	Jaringan Pemasaran
		500.6.18	Administrasi Penelitian,Pengkajian, dan Pengembangan, antara lain: Rencana Kerja, TOR/ Proposal, Pembentukan Tim Kerja dan Surat menyurat	
		500.6.19	Hasil Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan	
			500.6.19.1	Hasil Penelitian dan Pengembangan
			500.6.19.2	Hasil Pengkajian dan Kebijakan dan Strategi
		500.6.20	Diseminasi	
		500.6.21	Publikasi Hasil Penelitian/ Pengkajian	
			500.6.21.1	Pameran, Temu Lapang, Temu Bisnis, Demlot, Seminar Lokakarya, Temu Karya, Workshop
			500.6.21.2	Jurnal, Buletin,

				Monograf, Prosiding, dan Pubikasi lainnya
		500.6.22	Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan	
		500.6.23	Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan	
		500.6.24	Data Penelitian dan Pengembangan	
		500.6.25	Evaluasi Penelitian/ Pengkajian dan Pengembangan	
		500.6.26	Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)	
			500.6.26.1	Hak Cipta
			500.6.26.2	Hak Paten Sederhana
			500.6.26.3	Hak Paten Biasa
			500.6.26.4	Hak Merek
			500.6.26.5	Pendaftaran Varietas Tanaman
			500.6.26.6	Permohonan Hak PVTT Tanaman Semusim dan Tahunan
			500.6.26.7	Permohonan HKI yang ditolak
		500.6.27	Pelayanan Perijinan Pertanian	
			500.6.27.1	Sarana I (bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian)
			500.6.27.2	Sarana II (bidang benih tanaman, bahan penelitian, teknis pangan segar asal tumbuhan, teknis pengalihan saham perkebunan)
			500.6.27.3	Sarana III (bidang bibit, karkas, daging, dan jeroan, pakan ternak, obat hewan, dan teknis sumber daya genetik ternak)
		500.6.28	Pelayanan Hukum	
			500.6.28.1	Sertifikasi
			500.6.28.2	Pertimbangan Hukum
		500.6.29	Karantina Pertanian	
			500.6.29.1	Karantina Tumbuhan
			500.6.29.2	Karantina Hewan
		500.6.30	Bimbingan Teknis	
		500.6.31	Evaluasi	
	500.7	PETERNAKAN		
		500.7.1	Kebijakan di bidang Peternakan yang	

			dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		500.7.2	Peternakan dan Kesehatan Hewan	
			500.7.2.1	Perbibitan Ternak, Antara lain: Produksi Bibit Ternak Ruminansia, Produksi Bibit Ternak Non Ruminansia, Penilaian dan Pelepasan Bibit ternak, Pengembangan Bibit Ternak, Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran
			500.7.2.2	Pakan Ternak
			500.7.2.3	Budidaya Ternak
			500.7.2.4	Kesehatan Hewan, Antara lain: Pengamatan Penyakit Hewan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan, Perlindungan Hewan, Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan, Pengawasan Obat Hewan
			500.7.2.5	Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen, Antara lain: Pascapanen, Higien Sanitasi, Pengawasan Sanitary dan Keamanan Produk Hewan, Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan, Pengujian dan Sertifikasi Produk Hewan, Surat Rekomendasi & Persetjuan Pemasukan/ Pengeluaran
		500.7.3	Bimbingn Teknis	
		500.7.4	Evaluasi	
	500.8	PERKEBUNAN		
		500.8.1	Kebijakan di bidang Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		500.8.2	Tanaman Semusim	
			500.8.2.1	Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Semusim
			500.8.2.2	Perbenihan Tanaman

				Semusim
			500.8.2.3	Budidaya Teknologi Budidaya Tanaman Semusim
			500.8.2.4	Pemberdayaan Tanaman Semusim
		500.8.3	Tanaman Rempah & Penyegar	
			500.8.3.1	Identifikasi dan Pendayaguunaan Sumber Daya Tanaman Rempah & Penyegar
			500.8.3.2	Perbenihan Tanaman Rempah & Penyegar
			500.8.3.3	Budidaya Tanaman Rempah & Penyegar
			500.8.3.4	Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Rempah & Penyegar
		500.8.4	Tanaman Tahunan	
			500.8.4.1	Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya, Tanaman Tahunan
			500.8.4.2	Perbenihan Tanaman Tahunan
			500.8.4.3	Budidaya Tanaman Tahunan
			500.8.4.4	Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Tahunan
		500.8.5	Perlindungan Perkebunan	
			500.8.5.1	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim, Perlindungan Perkebunan
			500.8.5.2	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar
			500.8.5.3	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan
			500.8.5.4	Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran

		500.8.6	Pascapanen dan Pembinaan Usaha	
			500.8.6.1	Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar
			500.8.6.2	Pascapanen Tanaman Tahunan
			500.8.6.3	Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan
			500.8.6.4	Gangguan Usaha dan Penanganan Konflik
		500.8.7	Bimbingan Teknis Perkebunan	
		500.8.8	Evaluasi Perkebunan	
	500.9	PERINDUSTRIAN		
		500.9.1	Kebijakan di bidang Perindustrian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		500.9.2	Iklim Usaha dan Kerja Sama	
			500.9.2.1	Industri Manufaktur
			500.9.2.2	Industri Agro
			500.9.2.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
			500.9.2.4	Industri Kecil dan Menengah
		500.9.3	Promosi Industri	
			500.9.3.1	Industri Manufaktur
			500.9.3.2	Promosi Industri Agro
			500.9.3.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
			500.9.3.4	Industri Kecil dan Menengah
		500.9.4	Standarisasi dan Teknologi	
			500.9.4.1	Industri Manufaktur
			500.9.4.2	Industri Agro
			500.9.4.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
			500.9.4.4	Industri Kecil dan Menengah
		500.9.5	Hak dan Kekayaan Intelektual	
			500.9.5.1	Industri Manufaktur
			500.9.5.2	Industri Agro
			500.9.5.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
			500.9.5.4	Industri Kecil dan Menengah
		500.9.6	Industri Hijau	
			500.9.6.1	Industri Manufaktur
			500.9.6.2	Industri Agro
			500.9.6.3	Industri Unggulan

				Berbasis Teknologi Tinggi
			500.9.6.4	Industri Kecil dan Menengah
		500.9.7	Analisis KerjaSama Industri Unggulan Kabupaten/Kota	
		500.9.8	Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Inti Industri (Provinsi dan Kabupaten/Kota)	
		500.9.9	Pengembangan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Kawasan Industri	
		500.9.10	Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri	
		500.9.11	Kerja Sama Ketahanan Industri Internasional	
		500.9.12	Standarisasi	
			500.9.12.1	Standar
			500.9.12.2	Penyiapan Penerapan
			500.9.12.3	Infrastruktur Standar
		500.9.13	Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri	
			500.9.13.1	Kebijakan Industri
			500.9.13.2	Perpajakan dan Tarif
			500.9.13.3	Pengembangan Model Industrial
		500.9.14	Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup	
			500.9.14.1	Industri Hijau
			500.9.14.2	Lingkungan Hidup
			500.9.14.3	Energi
		500.9.15	Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual	
			500.9.15.1	Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri
			500.9.15.2	Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri
			500.9.15.3	Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual
		500.9.16	Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Industri	
	500.10	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		
		500.10.1	Kebijakan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		500.10.2	Rekomendasi Kegeologian	
			500.10.2.1	Mitigasi Gunung Api, Gempa Bumi, Tsunami, dan Gerakan Tanah
			500.10.2.2	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan

			500.10.2.3	Pertambangan
			500.10.2.4	Panas Bumi
			500.10.2.5	Geosains
			500.10.2.6	Pengukuran Time Domain Electromagnetic (TDEM)
			500.10.2.7	Kelayakan Lingkungan
		500.10.3	Penelitian Kegeologian	
			500.10.3.1	Administrasi pelaksanaan penelitian
			500.10.3.2	Administrasi tenaga penelitian
			500.10.3.3	Administrasi penggunaan peralatan penelitian
			500.10.3.4	Log-book peralatan survei/peralatan uji/kalibrasi
			500.10.3.5	Hasil penelitian dan penyelidikan kegeologian
			500.10.3.6	Sumber Daya Geologi
			500.10.3.7	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
			500.10.3.8	Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
			500.10.3.9	Survei Geologi
		500.10.4	Inventarisasi dan evaluasi kegeologian	
			500.10.4.1	Sumber Daya Geologi
			500.10.4.2	Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
			500.10.4.3	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
			500.10.4.4	Survei Geologi
			500.10.4.5	Konservasi
		500.10.5	Administrasi Pelayanan Kegeologian dan Penyajian Data dan Informasi	
			500.10.5.1	Peta potensi dan sebaran
			500.10.5.2	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
			500.10.5.3	Mitigasi Bencana Gunungapi, Gerakan Tanah, Gempa Bumi dan Tsunami, Semburan Lumpur/Gas serta kebakaran Batubara
		500.10.6	Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi	
			500.10.6.1	Rencana Induk Jaringan Gas Bumi

			500.10.6.2	Rencana dan Realisasi Investasi
			500.10.6.3	Penetapan Harga Minyak Mentah
			500.10.6.4	Penetapan Bagii Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Minyak dan Gas Bumi
			500.10.6.5	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP
			500.10.6.6	Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
			500.10.6.7	Rekomendasi Kemampuan Produksi Barang dan Jasa Dalam Negeri
			500.10.6.8	Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) dan Rencana Impor Barang (RIB)
		500.10.7	Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	
			500.10.7.1	Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Minyak dan Gas Bumi (Konvensional dan Non Konvensional)
			500.10.7.2	Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Pemanfaatan Data Migas untuk presentasi makalah, publikasi makalah, pembukaan data, Izin Pengiriman Data ke Luar Negeri, Izin Pengiriman Data ke Luar Negeri, Unitisasi Lapangan Minyak dan Gas Bumi, Rekomendasi Pengalihan Interest, Rekomendasi Penyisihan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, Penyiapan Dokumen Pengakhiran Kontrak, Laporan Data Survei Seismik, Laporan Data Pemboran Sumur

				Eksplorasi per semester, Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi Tahunan)
			500.10.7.3	Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Rekomendasi Penggunaan Data Eksploitasi (publikasi makalah, analisa laboratorium, Reprocessing), Penetapan Pengusahaan Minyak Bumi dari Sumur Tua, Penetapan Pengusahaan Lapangan Produksi yang Dikembalikan Kepada Pemerintah, Buku Cadangan Minyak dan Gas Bumi,Data Cadangan Strategis/Penyangga Minyak dan Gas Bumi, Laporan Hasil Pemantauan Data Produksi Minyak dan Gas Bumi, Laporan Hasil Inventarisasi Mutu Minyak dan Gas Bumi)
			500.10.7.4	Pengembangan lapangan Minyak dan Gas Bumi (POD)
			500.10.7.5	Perpanjangan Kontrak KKS
			500.10.7.6	Penetapan Alokasi dan Harga Gas
			500.10.7.7	Partisipasi Interest
			500.10.7.8	Tumpang Tindih Lahan
		500.10.8	Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	
			500.10.8.1	Perumusan pedoman, prosedur, layanan serta pengawasan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga Minyak Bumi dan Gas Bumi, Hasil Olahan dan Bahan Bakar Lain,

				Antara lain: Pedoman dan Prosedur, Layanan Usaha (Izin/rekomendasi/penandasahan), Pengawasan
			500.10.8.2	Fasilitasi dan pertimbangan pelanggaran
			500.10.8.3	Penetapan Harga dan Subsidi Bahan Bakar yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri
		500.10.9	Teknik dan Lingkungan	
			500.10.9.1	Perumusan pelaksanaan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) / Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)
			500.10.9.2	Registrasi Nomor Pelumas Terdaftar (NPT), Antara lain: Berkas permohonan, Berita Acara Hasil Evaluasi, Salinan Sertifikat NPT, Register NPT
			500.10.9.3	Buku Register Welding Procedure Specification (WPS)/ Procedure Qualification Record (PQR)
			500.10.9.4	Register dan Sertifikat Kualifikasi Juru Las
			500.10.9.5	Keselamatan Hulu Minyak dan Gas Bumi, Antara lain: Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi
			500.10.9.6	Keselamatan Hilir Minyak dan Gas Bumi, Antara lain: Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi

			500.10.9.7	Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan
			500.10.9.8	Dokumen Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang Hulu dan Hilir, Antara lain: Dokumen Permohonan Pengajuan persetujuan penunjukkan Calon kepala/wakil kepala teknik tambang minyak dan gas bumi, Surat Undangan Presentasi, Makalah Presentasi, Surat Persetujuan/ Pengesahan penunjukan kepala/wakil Kepala Teknik Tambang Minyak dan Gas Bumi
			500.10.9.9	Penghargaan Keselamatan Kerja, Antara lain: urat Permohonan Mendapatkan Penghargaan, Surat Penugasan Dalam Rangka Verifikasi, Berkas Hasil Evaluasi Verifikasi, Salinan Tanda Penghargaan, Dokumen Pengajuan dan penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi
			500.10.9.10	Usaha penunjang
		500.10.10	Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	
			500.10.10.1	Perencanaan Program Kerja Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
			500.10.10.2	PengadaanPembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
			500.10.10.3	Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

			500.10.10.4	Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Infrastuktur Minyak dan Gas Bumi
		500.10.11	Penyiapan Program Energi Terbarukan dan Konservasi Energi	
			500.10.11.1	Usulan Wilayah Kerja Panas Bumi
			500.10.11.2	Usul Program Aneka Energi Pemerintah Daerah dan Lembaga
			500.10.11.3	Penyiapan Program Pemanfaatan Energi
			500.10.11.4	Proyeksi Kebutuhan Energi dari EBT
			500.10.11.5	Perencanaan Pemanfaatan Energi dari EBT
			500.10.11.6	Penyusunan Neraca Energi
			500.10.11.7	Road Map di Bidang EBT
		500.10.12	Panas Bumi	
			500.10.12.1	Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
			500.10.12.2	Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI)
			500.10.12.3	Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Peralatan
			500.10.12.4	Rekomendasi Bahan Peledak
			500.10.12.5	Perizinan penggunaan gudang bahan peledak
			500.10.12.6	Izin Tangki Bahan Bakar Cair
			500.10.12.7	Persetujuan sertifikasi Welding Prosedure Specifikation (WPS) dan Prosedure Qualification Record (PQR) dan kualifikasi Juru LasQualification Record (PQR) dan kualifikasi Juru Las
			500.10.12.8	Penerbitasn Izin Usaha

				Panas Bumi (IUP)
			500.10.12.9	Penerbitan Izin Panas Bumi (IPB)
			500.10.12.10	Penerbitan Izin Pemanfaatan Langsung (IPL)
			500.10.12.11	Penetapankapasitas usaha panas bumi
			500.10.12.12	Penetapankapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
			500.10.12.13	Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Panas Bumi
			500.10.12.14	Pelaksanaan Kerja Sama Panas Bumi
			500.10.12.15	Inventarisasi, Verifikasi dan Evaluasi Obvitnas Bidang Panas Bumi
			500.10.12.16	Monitoring Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) pada Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi
			500.10.12.17	Pembinaan dan Pengawasan Investasi Panas Bumi
		500.10.13	Bioenergi	
			500.10.13.1	Penerbitan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (BNN)
			500.10.13.2	Pengadaan Bahan Bakar Nabati (BBN)
			500.10.13.3	Penerbitan Rekomendasi Ekspor - Impor
			500.10.13.4	Penetapan Indeks Harga Pasar BBN (HIP BBN)
			500.10.13.5	Evaluasi/Revisi HIP BBN
			500.10.13.6	Database Pengusahaan Bioenergi
			500.10.13.7	Penetapan Badan Usaha sebagai Pengelola Energi Biomassa atau Biogas untuk Pembangkit Listrik

			500.10.13.8	Penetapan Spesifikasi Bahan Bakar Nabati
			500.10.13.9	Usul Program Bioenergi Pemerintah Daerah dan Lembaga
		500.10.14	Aneka Energi	
			500.10.14.1	Penerbitan Izin Usaha Aneka Energi
			500.10.14.2	Penetapan Kapasitas Usaha
			500.10.14.3	Rekomendasi Kompetensi dan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
			500.10.14.4	Rekomendasi Persetujuan Perubahan Pemegang Saham
			500.10.14.5	Persetujuan Rencana Impor Barang (RIB)
		500.10.15	Konservasi Energi	
			500.10.15.1	Audit Energi melalui program kemitraan Konservasi Energi
			500.10.15.2	Monitoring Implementasi hasil audit energi melalui program kemitraan konservasi energi
			500.10.15.3	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan manajamen energi di pengguna energi di atas 6.000 TOE
			500.10.15.4	Pengawasan sertifikasi label dan tanda hemat energi pada lampu swabalast
			500.10.15.5	Penyusunan daftar peralatan/teknologi efisiensi
			500.10.15.6	Penyusunan emisi energi gas rumah kaca
			500.10.15.7	Pemberian insentif dan disinsentif konservasi energi
			500.10.15.8	Profil investasi efisiensi energi
			500.10.15.9	Invesment Grade Audit (IGA)
			500.10.15.10	Bimbingan Teknis Bidang

				EBTKE
		500.10.16	Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE	
			500.10.16.1	Usul Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Daerah dan Lembaga
			500.10.16.2	Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
			500.10.16.3	Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Bidang EBTKE
			500.10.16.4	Evaluasi Program Kerja
		500.10.17	Bina Program Tenaga Listrik	
			500.10.17.1	Investasi dan pendanaan tenaga listrik, Antara lain:, Dokumen grant/hibah/loan agreement luar negeri, Monitoring loan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, Laporan penanganan permasalahan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, Laporan kegiatan investasi dan pendanaan tenaga listrik
			500.10.17.2	Pengembangan listrik pedesaan, Antara lain: Data program listrik perdesaan, Data rasio elektrifikasi (RE) dan Rasio Desa Berlistrik (RD), Monitoring dan evaluasi listrik perdesaan, Listrik untuk masyarakat tidak mampu
			500.10.17.3	Data dan Informasi Ketenagalistrikan
		500.10.18	Bina Usaha Ketenagalistikan	
			500.10.18.1	Penyiapan Usaha Ketenagalistrikan, Antara lain: Pelayanan izin usaha penyediaan tenaga listrik (IO, IUPL-S, dan

				IUPL), Bimbingan Usaha Ketenagalistrikan, Data laporan berkala pemegang Izin
			500.10.18.2	Harga dan Subsidi Listrik
			500.10.18.3	Hubungan komersial tenaga listrik
			500.10.18.4	Perlindungan konsumen listrik, Antara lain: Penanganan pengaduan konsumenlistrik, Dokumen Pengawasan tingkat mutu pelayanan tenaga listrik, Dokumen Evaluasi realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik, Dokumen evaluasi pemberian kompensasi pinalti tingkat mutu pelayanan PT PLN (Persero)
		500.10.19	Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan	
			500.10.19.1	Kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan
			500.10.19.2	Penyiapan kompetensi dan pengawasan tenaga teknik ketenagalistrikan
			500.10.19.3	Usaha penunjang ketenagalistrikan, Antara lain: Dokumen Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL), Dokumen Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telematika (IPJ Telematika), Dokumen Penandasahan Rencana Impor Barang (RIB)
			500.10.19.4	Perlindungan lingkungan ketenagalistrikan, Antara lain: Dokumen forum keselamatan instalasi pemanfaatan tenaga listrik, Dokumen pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup sektor

				ketenagalistrikan, Laporan pembinaan dan pengawasan lingkungan, Dokumen perhitungan faktor emisi Clean Development Mechansim (CDM)
		500.10.20	Sertifikasi	
			500.10.20.1	Dokumen Sertifikasi Produk peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik
			500.10.20.2	Dokumen Penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK)
			500.10.20.3	Dokumen Penerbitan Sertifikasi Laik Operasi (SLO) Instalasi Tenaga Listrik
			500.10.20.4	Dokumen Pembinaan dan pengawasan sertifikat laik operasi (SLO) instalasi tenaga listrik
			500.10.20.5	Registrasi Sertifikasi
		500.10.21	Akreditasi Ketenagalistrikan	
		500.10.22	Standarisasi Kompetensi	
		500.10.23	Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) Bidang Ketenagalistrikan	
			500.10.23.1	Perumusan rancangan SNI bidang ketenagalistrikan
			500.10.23.2	Forum konsensus rancangan SNI bidang ketenagalistrikan
			500.10.23.3	Program pemberlakuan SNI wajib bidang ketenagalistrikan
			500.10.23.4	Dokumen pengawasan penerapan SNI wajib bidang ketenagalistrikan
		500.10.24	Standardisasi Usaha Penunjang Ketenagalistrikan	
			500.10.24.1	Klasifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan
			500.10.24.2	Kualifikasi usaha penunjang

				ketenagalistrikan
			500.10.24.3	Dokumen penunjukan LIT (Lembaga Inspeksi Teknis)
			500.10.24.4	Laporan berkala pemegang penunjukan LIT
			500.10.24.5	Laporan hasil pengawasan penunjukan
		500.10.25	Bina Program Mineral dan Batubara	
			500.10.25.1	Penyiapan dan Perencanaan Program Mineral dan Batubara
			500.10.25.2	Rencana Induk Mineral dan Batubara
			500.10.25.3	Pengembangan Investasi dan Kerja Sama Bidang Mineral dan Batubara
			500.10.25.4	Data dan Informasi Mineral dan Batubara
			500.10.25.5	Pelaporan Program Mineral dan Batubara
			500.10.25.6	Perencanaan, Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Mineral dan Batubara melalui lelang reguler
			500.10.25.7	Data dan Informasi Wilayah Mineral dan Batubara
			500.10.25.8	Perencanaan Produksi Mineral dan Batubara
			500.10.25.9	Pengembangan dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara
		500.10.26	Pembinaan Pengusahaan Mineral	
			500.10.26.1	Ketenagakerjaan
			500.10.26.2	Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang
			500.10.26.3	Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan mineral
			500.10.26.4	Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan mineral
			500.10.26.5	Laporan/data kegiatan eksplorasi mineral

			500.10.26.6	Pengawasan produksi dan pemasaran mineral (logam, bukan logam batuan, radioaktif, dan mineral jarang)
			500.10.26.7	Perizinan usaha pertambangan mineral
			500.10.26.8	Kontrak Karya (KK)
			500.10.26.9	Pengelolaan barang Kontrak Karya (KK)
			500.10.26.10	Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)
			500.10.26.11	Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan mineral
			500.10.26.12	Teguran kepada pengusahan Kontrak Karya (KK)
			500.10.26.13	Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan mineral
			500.10.26.14	Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir
			500.10.26.15	Pelaporan usaha pertambangan mineral
			500.10.26.16	Penghargaan usaha pertambangan mineral
			500.10.26.17	Penerbitan sertifikat clear and clean (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral
		500.10.27	Pembinaan Pengusahaan Batubara	
			500.10.27.1	Ketenagakerjaan
			500.10.27.3	Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan batubara
			500.10.27.4	Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan batubara
			500.10.27.5	Laporan/data kegiatan eksplorasi batubara
			500.10.27.6	Pengawasan produksi dan pemasaran batubara

				(bitumen padat, batuan aspal, batubara dan gambut), Antara lain: Laporan Produksi dan Penjualan Batubara PKP2B, IUP hingga Laporan Kontrak Penjualan Pertambangan Batubara
			500.10.27.7	Perizinan Usaha Pertambangan Batubara
			500.10.27.8	Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)
			500.10.27.9	Pengelolaan Barang Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B), Antara lain: Persetujuan Pengadaan Barang Modal (Masterlist)
			500.10.27.10	Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)
			500.10.27.11	Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)
			500.10.27.12	Teguran kepada pengusahan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)
			500.10.27.13	Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan batubara
			500.10.27.14	Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir
			500.10.27.15	Pelaporan usaha pertambangan batubara
			500.10.27.16	Penghargaan usaha pertambangan batubara
			500.10.27.17	Penerbitan sertifikat clear and clean (CnC) Izin Usaha Pertambangan

				(IUP) Batubara
		500.10.28	Penerimaan Negara	
			500.10.28.1	Penerimaan Negara Bukan Pajak
			500.10.28.2	Penetapan Bagi Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
			500.10.28.3	PelaksanaanPemeriksaan dan Pengujian PNBP
		500.10.29	Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara	
			500.10.29.1	Perumusan RSNI (Rancangan Standar Nasional Indonesia)/ RSKKNI (Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia), Antara lain: Draft Rancangan, Rancangan Standar Nasional
			500.10.29.2	Pengawasan Standardisasi
			500.10.29.3	PersetujuanPenunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang
			500.10.29.4	Pengawasan Keselamatan Kegiatan dan Keselamatan Pekerja, Antara lain: Laporan Kecelakaan Tambang/Statistik hingga Laporan Hasil Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
			500.10.29.5	Pemeriksaan teknis dan pengujian instalasi dan peralatan tambang, Antara lain: Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi dan Peralatan
			500.10.29.6	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
			500.10.29.7	Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan

				Lingkungan (UPL)
			500.10.29.8	Rekomendasi bahan kimia
			500.10.29.9	Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, Antara lain: Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan(RKL)/Renca na Pemantauan Lingkungan (RPL) hingga Surat Penetapan Jaminan Pasca Tambang
			500.10.29.10	Laporan berkala teknik dan lingkungan pertambangan/ laporan tahunan, Antara lain: Laporan Bulanan Terjadinya Pencemaran (LPL- 5) pelaksanaan reklamasi
			500.10.29.11	Pemberian Penghargaan, Antara lain: Pemberian Penghargaan Lingkungan Pertambangan, Pemberian Penghargaan Keselematan Kerja, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan lingkungan Pertambangan, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan
			500.10.29.12	Pengawasan lingkungan pertambangan
			500.10.29.13	Usaha Jasa Mineral dan Batubara
			500.10.29.14	Pembinaan dan pengawasan usaha jasa mineral dan batubara
			500.10.29.15	Rekomendasi Teknis, Antara lain: Pengajuan Rekomendasi Teknis, Hasil Evaluasi
			500.10.29.16	Persetujuan Teknis, Antara lain: Pengajuan Persetujuan Teknis, Hasil

				Evaluasi
			500.10.29.17	Pengawasan Teknis
			500.10.29.18	Pengawasan Konservasi Mineral dan Batubara
			500.10.29.19	Peminaan Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Antara lain: Sosialisasi Standardisasi, Bimbingan Teknis
		500.10.30	Program Penelitian dan Pengembangan	
			500.10.30.1	Rencana Penelitian dan Pengembangan
			500.10.30.2	Pengembangan dan inovasi
			500.10.30.3	Dokumenpenerapan/pemanfaatan/pendayagunaan/replikasi/prototipe hasil penelitian/pengkajian/pengembangan /inovasi
			500.10.30.4	Advokasi dan fasilitasi penelitian, pengembangan dan inovasi
			500.10.30.5	Diseminasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
			500.10.30.6	Pembinaanpenelitian/Pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahunan dan teknologi
			500.10.30.7	Jaringan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
			500.10.30.8	Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
			500.10.30.9	Master proceeding/

				jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
			500.10.30.10	Hak atas kekayaan intelektual (HaKI)
			500.10.30.11	Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
			500.10.30.12	Layanan jasa penelitian, pengembangan, penerapan IPTEK
			500.10.30.13	Sertifikasi personil peneliti bidang Sumber Daya Mineral
		500.10.31	Sarana Litbang	
			500.10.31.1	Administrasi penggunaan peralatan
			500.10.31.2	Log-book Peralatan Survei/Peralatan Uji Kalibrasi
		500.10.32	Afiliasi	
			500.10.32.1	Proyek Percontohan
			500.10.32.2	Promosi dan Layanan Jasa Teknologi
			500.10.32.3	PembinaanPenelitian dan Pengembangan
			500.10.32.4	Penyajian Informasi
		500.10.33	Penelitian dan Pengembangan Kegeologian	
			500.10.33.2	Pemetaaan dan penelitian geologi, geokimia, dan geofisika kelautan
			500.10.33.3	Penelitian sumber daya energi dan mineral kelautan
			500.10.33.4	Penelitian Sumber Daya Mineral Kelautan
		500.10.34	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi	
			500.10.34.1	Teknologi Eksplorasi
			500.10.34.2	Teknologi Eksploitasi
			500.10.34.3	Laboratorium
			500.10.34.4	Study

			500.l0.34.5	Teknologi Proses
			500.10.34.6	Teknologi Aplikasi Produk
			500.10.34.7	Teknologi Gas
		500.10.35	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral Batubara	
			500.10.35.1	TeknologiEksploitasiTambang dan Pengolahan Sumber Daya
			500.10.35.2	Teknologi Pengolahan dan Pemanfaatan mineral
			500.10.35.3	Teknologi Pemanfaatan Batubara
		500.10.36	Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan	
			500.10.36.1	Energi baru terbarukan
			500.10.36.2	Teknologi Ketenagalistrikan
			500.10.36.3	Lingkungan dan Konservasi Energi
			500.10.36.4	Penelitian dan Pengembangan Teknologi PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) dan Konservasi Energi
	500.11	PERHUBUNGAN		
		500.11.1	Kebijakan di bidang Perhubungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		500.11.2	Jaringan Prasarana dan Pelayanan	
			500.11.2.1	Penentuan lokasi terminal barang tipe pengumpul dan tipe penunjang
			500.11.2.2	Penentuan lokasi terminal penumpang tipe A, tipe B, dan tipe C
			500.11.2.3	Penetapanlokasi terminal barang utama
			500.11.2.4	Standar pelayanan minimal pengoperasian terminal
			500.11.2.5	Jaringan trayek angkutan antar kota/provinsi
			500.11.2.6	Jaringan lintas pada jaringan jalan primer

			500.11.2.7	Penetapan kelas jalan primer
			500.11.2.8	Kualifikasi teknis petugas terminal
			500.11.2.9	Jaringan transportasi jalan sekunder
		500.11.3	Pengembangan Transportasi Jalan	
			500.11.3.1	Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan
			500.11.3.2	Pengembangan transportasi jalan
			500.11.4	Pengujian Kendaraan Bermotor
			500.11.4.1	Pengesahan hasil uji tipe kendaraan bermotor
			500.11.4.2	Sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor
			500.11.4.3	Sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor
			500.11.4.4	Akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor
		500.11.5	Teknologi Kendaraan Bermotor	
			500.11.5.1	Sertifikasi rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor
			500.11.5.2	Pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor
			500.11.5.3	Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor
			500.11.5.4	Harmonisasi dan standardisasi regulasi kendaraan bermotor
		500.11.6	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	
			500.11.6.1	Analisa dampak lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan
			500.11.6.2	Manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional
		500.11.7	Perlengkapan Jalan	
			500.11.7.1	Pedoman teknis perlengkapan jalan
			500.11.7.2	Penimbangan kendaraan bermotor di jalan

			500.11.7.3	Akreditasi unit penimbangan kendaraan bermotor
			500.11.7.4	Kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan bermotor
			500.11.7.5	Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan nasional
		500.11.8	Angkutan Penumpang	
			500.11.8.1	Tarif angkutan penumpangb kelas ekonomi
			500.11.8.2	Izin trayek angkutan penumpang untuk trayek lintas batas negara
			500.11.8.3	Izin trayek antar kota antar provinsi
			500.11.8.4	Izin operasi angkutan pariwisata dan angkutan penumpang tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya bersifat lintas batas negara & antar kota/provinsi
			500.11.8.5	Penilaian kinerja perusahaan angkutan umum
			500.11.8.6	Pemberian subsidi angkutan umum
			500.11.8.7	Angkutan perintis
			500.11.8.8	Penghargaan perusahaan angkutan umum
		500.11.9	Angkutan Barang	
			500.11.9.1	Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan
			500.11.9.2	Tarif angkutan barang
			500.11.9.3	Izin operasi angkutan barang tertentu
			500.11.9.4	Pembinaan angkutan barang
			500.11.9.5	Izin dispensasi angkutan jalan
		500.11.10	Monitoring Operasional	
			500.11.10.1	Pengendalian operasional

				Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
			500.11.10.2	Pengawasan, penertiban dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran operasional kendaraan angkutan umum yang menjadi kewenangan
			500.11.10.3	Berkas Pelanggaran Perda
		500.11.11	Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil	
			500.11.11.1	Pedoman Teknis
			500.11.11.2	Penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
			500.11.11.3	Bimtek PPNS
			500.11.11.4	Pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
		500.11.12	Analisa dan Evaluasi Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan	
			500.11.12.1	Pendataan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan
			500.11.12.2	Analisis serta informasi jaringan transportasi sungai, danau, & penyeberangan
		500.11.13	Pengembangan Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan	
			500.11.13.1	Pengembangan dan penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan (peta jaringan, blueprint jaringan)
			500.11.13.2	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen

				(SIM) lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan
		500.11.14	Rancang Bangun Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	
		500.11.15	Bimbingan Perawatan Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	
			500.11.15.1	Perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan
			500.11.15.2	Pengawakan dan registrasi sarana angkutan sungai dan danau danau dan penyeberangan
		500.11.16	Rancang Bangun Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	
			500.11.16.1	Perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan
			500.11.16.2	Pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan
			500.11.16.3	Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas nasional dan internasional
			500.11.16.4	Penyelenggaraan,pemeliharaan,perawatan dan perbaikan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan
		500.11.17	Kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan	
		500.11.18	Manajemen Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan	
			500.11.18.1	Manajemen lalu lintas
			500.11.18.2	Tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyeberangan
			500.11.18.3	Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang lalu lintas dan angkutan sungai & danau
			500.11.18.4	Sertifikasi inspektur

				sungai dan danau dan pejabat pemberangkatan angkutan sungai dan danau
		500.11.19	Alur dan Perambuan Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan	
			500.11.19.1	Pengerukan alur pelayaran sungai, danau dan kolam pelabuhan penyeberangan
			500.11.19.2	Penetapan kelas alur dan peta alur pelayaran sungai dan danau
			500.11.19.3	Perambuan sungai, danau dan penyeberangan
		500.11.20	Bimbingan Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	
			500.11.20.1	Penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan
			500.11.20.2	Persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan internasional
		500.11.21	Tarif dan Keperintisan	
			500.11.21.1	Perhitungan tarif, pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan
			500.11.21.2	Kriteria dan pelaksanaan pelayanan keperintisan
		500.11.22	Bina Sistem Transportasi Perkotaan	
			500.11.22.1	Jaringan Transportasi Perkotaan
			500.11.22.2	Transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan
			500.11.22.3	Transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi
		500.11.23	Lalu Lintas Perkotaan	
			500.11.23.1	Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan

			500.11.23.2	Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan di jalan nasional dalam kawasan perkotaan
			500.11.23.3	Penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah
		500.11.24	Angkutan Perkotaan	
			500.11.24.1	Penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek
			500.11.24.2	Jaringan trayek perkotaan
			500.11.24.3	Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi
		500.11.25	Pengaduan Moda Transportasi Perkotaan	
			500.11.25.1	Penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang dan/atau barang
			500.11.25.2	Pengaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi
			500.11.25.3	Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi
		500.11.26	Dampak Transportasi Perkotaan	
			500.11.26.1	Penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan
			500.11.26.2	Penanganan dampak

				transportasi di kawasan perkotaan
			500.11.26.3	Masterplan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan
			500.11.26.4	Pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan kota
			500.11.26.5	Rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan
			500.11.26.6	Masterplan transportasi perkotaan
		500.11.27	Monitoring dan Evaluasi Manajemen Keselamatan	
			500.11.27.1	Monitoring dan evaluasi data kecelakaan
			500.11.27.2	Kualifikasi unit pengkajian
			500.11.27.3	Pengembangan sistem informasi manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan
		500.11.28	Pengembangan Keselamatan	
			500.11.28.1	Program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan
			500.11.28.2	Harmonisasi kebijakan
		500.11.29	Promosi dan Kemitraan Keselamatan	
			500.11.29.1	Promosi Keselamatan: penyuluhan, publikasi dan destinasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan
			500.11.29.2	Kemitraan keselamatan antar lembaga dan masyarakat di bidang

				keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan
		500.11.30	Bina Keselamatan Angkutan Umum	
			500.11.30.1	Keselamatan Pengusahaan Angkutan Umum
			500.11.30.2	Keselamatan Awak Angkutan Umum dan awak kapal sungai dan danau
		500.11.31	Audit Keselamatan	
			500.11.31.1	Pedoman audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia
			500.11.31.2	Identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan
			500.11.31.3	Audit faktor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan
		500.11.32	Inspeksi Keselamatan	
			500.11.32.1	Pedoman keselamatan
			500.11.32.2	Inspeksi keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan
			500.11.32.3	Investigasi kecelakaan sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan
		500.11.33	Parkir	
			500.11.33.1	Surat Tugas Juru Parkir
			500.11.33.2	Izin tempat khusus parkir swasta
			500.11.33.3	Surat Tugas TKP Pemerintah
	500.12	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
		500.12.1	Kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika yang dilakukan oleh Pemerintah	

			Daerah	
			500.12.2.1	Layanan Jaringan Telekomunikasi
			500.12.2.2	Layanan Jasa Telekomunikasi
			500.12.2.3	Penomoran Telekomunikasidan Informatika
			500.12.2.4	Kelayakan Sistem Telekomunikasi
		500.12.3	Penyiaran	
			500.12.3.1	Pemetaan Penyelenggaraan Radio dan Televisi
			500.12.3.2	Database Penyelenggaraan Radio dan Televisi
		500.12.4	Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik dan Kewajiban Universal	
			500.12.4.1	Telekomunikasi Khusus Pemerintah Daerah
			500.12.4.2	Telekomunikasi Khusus Non Pemerintah Daerah
			500.12.4.3	Layanan Khusus Penyiaran
			500.12.4.4	Pelayanan Kewajiban Universal
			500.12.4.5	Pengembangan Infrastruktur
		500.12.5	Pengendalian Informatika	
			500.12.5.1	Monitoring dan Evaluasi Jaringan Telekomunikasi
			500.12.5.2	Monitoring dan Evaluasi Jasa Telekomunikasi
			500.12.5.3	Monitoring dan Evaluasi Penyiaran
			500.12.5.4	Pencegahan dan Penertiban
		500.12.6	e- Government	
			500.12.6.1	Tata Kelola e-Government
			500.12.6.2	Teknologi dan Infrastruktur e-Government
			500.12.6.3	Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Government

			500.12.6.4	Aplikasi Layanan Kepemerintahan
			500.12.6.5	Aplikasi Layanan Publik
		500.12.7	e- Business	
			500.12.7.1	Tata Kelola e-Business
			500.12.7.2	Teknologi dan Infrastruktur e- Business
			500.12.7.3	Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Business
			500.12.7.4	Aplikasi Layanan e-Busniness
		500.12.8	Pemberdayaan Informatika Masyarakat	
			500.12.8.1	Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan
			500.12.8.2	Pemberdayaan Informatika Masyarakat Pedesaan
		500.12.9	Pemberdayaan Industri Informatika	
			500.12.9.1	Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika
			500.12.9.2	Industri Perangkat Informatika Pengguna
			500.12.9.3	Industri Perangkat Lunak
			500.12.9.4	Industri Konten Multimedia
		500.12.10	Keamanan Informasi	
			500.12.10.1	Tata Kelola Keamanan Informasi
			500.12.10.2	Teknologi Keamanan Informasi
			500.12.10.3	Monitoring, Evaluasi dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi
			500.12.10.4	Penyidikan dan Penindakan
			500.12.10.5	Budaya Keamanan Informasi
		500.12.11	Komunikasi Publik	
			500.12.11.1	Tata Kelola Komunikasi Publik
			500.12.11.2	Pengelolaan Opini Publik
			500.12.11.3	Layanan Komunikasi Publik
		500.12.12	Pengolahan dan Penyediaan Informasi	
			500.12.12.1	Informasi Politik,

				Hukum, dan Keamanan
			500.12.12.2	Informasi Perekonomian
			500.12.12.3	Informasi Kesejahteraan Rakyat
		500.12.13	Pengelolaan Media Publik	
			500.12.13.1	Media Cetak
			500.12.13.2	Media Online
			500.12.13.3	Media Luar Ruang dan Audio Visual
		500.12.14	Kemitraan Komunikasi	
			500.12.14.1	Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara
			500.12.14.2	Kemitraan Media dan Dunia Usaha
			500.12.14.3	Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi
		500.12.15	Infrastruktur Informatika	
			500.12.15.1	Jaringan
			500.12.15.2	Piranti Teknologi Informatika
			500.12.15.3	Keamanan Informatika
		500.12.16	Sistem dan Data	
			500.12.16.1	Portal dan Konten
			500.12.16.2	Pengumpulan dan Pengolahan Data
			500.12.16.3	Pengembangan Aplikasi
		500.12.17	Pusat Kerjasama	
			500.12.17.1	Kerja Sama daerah
			500.12.17.2	Kerja Sama Bilateral
		500.12.18	Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat	
			500.12.18.1	Pelayanan Informasi
			500.12.18.2	Hubungan Masyarakat
			500.12.18.3	Bimbingan Teknis
		500.12.19	Evaluasi	
	500.13	PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		
		500.13.1	Kebijakan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		500.13.2	Pengembangan Destinasi Wisata	
			500.13.2.1	Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata
			500.13.2.2	Pengembangan Daya Tarik Wisata
			500.13.2.3	500.13.2.3 Industri Pariwisata
			500.13.2.4	Pemberdayaan Masyarakat Destinasi

				Pariwisata
			500.13.2.5	Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan Event
		500.13.3	Pemasaran Pariwisata	
			500.13.3.1	Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata
			500.13.3.2	Promosi Pariwisata Luar Negeri
			500.13.3.3	Promosi Pariwisata Dalam Negeri
			500.13.3.4	Pencitraan Indonesia
		500.13.4	Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya	
			500.13.4.1	Pengembangan industri Perfilman
			500.13.4.2	Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik
			500.13.4.3	Pengembangan Seni Rupa
		500.13.5	Ekonomi Kreatif Berbasi Media, Desain, dan IPTEK	
			500.13.5.1	Pengembangan EkonomiKreatif Berbasis Media
			500.13.5.2	Desain dan Arsitektur
			500.13.5.3	Kerjasama dan Fasilitasi
		500.13.6	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
			500.13.6.1	Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisataan
			500.13.6.2	Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif
			500.13.6.3	Pengembangan SDM Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif
			500.13.6.4	Kompetensi Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif
	500.14	STATISTIK		
		500.14.1	Kebijakan di bidang Statistik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		500.14.2	Sensus Penduduk, Pertanian, dan Ekonomi	
			500.14.2.1	Perencanaan

			500.14.2.2	Persiapan, Antara lain: Penyusunan rancangan organisasi kegiatan sensus, Penyusunan Kuesioner, Penyusunan konsep dan definisi, Penyusunan metodologi (cakupan, organisasi, lapangan, ukuran statistik, prosedur), Penyusunan buku pedoman (pencacahan, pengawasan, pengolahan), Penyusunan peta wilayah kerja dan muatan peta wilayah, Penyusunan pedoman sosialisasi, Sosialisasi kegiatankepada stakeholder dan sumber data (leaflet, poster, pertemuan), Pelaksanaan pertemuan koordinasi (intern dan ekstern), Pelaksanaan pelatihan instruktur (TOT), Pelaksanaan pelatihan petugas, Penyusunan program pengolahan (rule validasi, pemeriksaan data entri, tabulasi), Pelatihan petugas pengolahan, Perancangan tabel, Pelaksanaan Ujicoba
			500.14.2.3	Pelaksanaan Lapangan
			500.14.2.4	Pengolahan, Antara lain: Pengelolaan dokumen (penerimaan/ pengiriman, pengelompokkan/Batching), Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/Coding), Perekaman data(entri,scanner), Tabulasi Data,

				Pemeriksaan tabulasi, Laporan konsistensi tabulasi
			500.14.2.5	Analisis dan Penyajian Hasil Sensus
			500.14.2.6	Diseminasi hasil sensus
		500.14.3	Survei	
			500.14.3.1	Perencanaan
			500.14.3.2	Persiapan
			500.14.3.3	Pelaksanaan Lapangan, Antara lain: Pelaksanaan listing, Pemilihan sampel, Pengumpulan data, Pemeriksaan, Pengawasan Lapangan, Monitoring kualitas
			500.14.3.4	Pengolahan, Antara lain: Pengelolaan dokumen (penerimaan/ pengiriman, pengelompokkan/ Batching), Pemeriksaan dokumen dan pengkodean(Editing/Coding), Perekaman data (entri, scanner), Tabulasi Data, Pemeriksaan tabulasi, Laporan konsistensi tabulasi
			500.14.3.5	Analisis dan Penyajian Hasil Survei, Antara lain: Pembahasan angka hasil pengolahan, Penyusunan
			500.14.3.6	Diseminasi hasil Survei
		500.14.4	KonsolidasiI Data Statistik	
			500.14.4.1	Kompilasi Data
			500.14.4.2	Analisis data
			500.14.4.3	Penyusunan Publikasi
		500.14.5	Evaluasi dan Pelaporan Sensus, Survei, dan Konsolidasi Data Statistik	
	500.1	KETENAGAKERJAAN		
		500.15.1	Kebijakan di bidang Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		500.15.2	Perencanaan Tenaga Kerja	
			500.15.2.1	Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah
			500.15.2.2	Perencanaan Tenaga

				Kerja Perusahaan Swasta
		500.15.3	Pengembangan Standarisasi Kompetensi	
			500.15.3.1	Penerapan Standar Kompetensi
			500.15.3.2	Pengembangan Standarisasi Kompetensi
			500.15.3.3	Pengembangan Program Pelatihan Ketenagakerjaan
			500.15.3.4	Pengembangan Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan
			500.15.3.5	Pengembangan Program Pelatihan Ketransmigrasian
		500.15.4	Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja	
			500.15.4.1	Akreditasi dan Sistem Informasi Kelembagaan
			500.15.4.2	Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan
			500.15.4.3	Pengembangan Standar Mutu (PSM) Lembaga Pelatihan
			500.15.4.4	Sistem Pendanaan dan Kerjasama Antar Lembaga
		500.15.5	Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan	
			500.15.5.1	Instrukturdan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah
			500.15.5.2	Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta
			500.15.5.3	Tenaga Pelatihan
			500.15.5.4	Sistem Informasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan
		500.15.6	Bina Pemagangan	
			500.15.6.1	Pemagangan Dalam Negeri
			500.15.6.2	Pemagangan Luar Negeri
			500.15.6.3	Perizinan dan Advokasi Pemagangan
			500.15.6.4	Promosi dan Jenjang Pemagangan
		500.15.7	Produktivitas dan Kewirausahaan	
			500.15.7.1	Pengembangan Promosi dan Kerjasama

				Produktivitas dan Kewirausahaan
			500.15.7.2	Pengembangan Sistem dan Peningkatan Produktivitas
			500.15.7.3	Pengembangan Pengukuran dan Kajian Produktivitas
			500.15.7.4	Pengembangan Kewirausahaan
		500.15.8	Pengembangan Pasar Kerja	
			500.15.8.1	Informasi Pasar Kerja
			500.15.8.2	Analisis Pasar Kerja
			500.15.8.3	Bursa Kerja
			500.15.8.4	Analisis Jabatan
		500.15.9	Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	
			500.15.9.1	Antar Kerja
			500.15.9.2	Penempatan Tenaga Kerja Khusus
			500.15.9.3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan
			500.15.9.4	Pemberdayaan Pengantar Kerja
		500.15.10	Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal	
			500.15.10.1	Tenaga Kerja Mandiri dan Sektoral Informal
			500.15.10.2	Pengembangan Padat Karya
			500.15.10.3	Terapan Teknologi Tepat Guna
			500.15.10.4	Pemberdayaan Pendampingan dan Kerjasama Antar Lembaga
		500.15.11	Standardisasi Profesi	
			500.15.11.1	Sistem Informasi dan Registrasi
			500.15.11.2	Pembakuan Akreditasi
		500.15.12	Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi	
			500.15.12.1	Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerjasama Bersama
			500.15.12.2	Perjanjian Kerja
			500.15.12.3	Kesejahteraan Pekerja
			500.15.12.4	Analisis Diskriminasi Syarat Kerja

		500.15.13	Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial	
			500.15.13.1	Organisasi Pekerja dan Pengusaha
			500.15.13.2	Kelembagaan Hubungan Industrial
			500.15.13.3	Pemasyarakatan Hubungan Industrial
		500.15.14	Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	
			500.15.14.1	Pengupahan
			500.15.14.2	Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja
		500.15.15	Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial	
			500.15.15.1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial
			500.15.15.2	Penyelenggaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
			500.15.15.3	Pemberdayaan Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
		500.15.16	Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	
			500.15.16.1	Pengawasan Norma Kerja
			500.15.16.2	Pengawasan Norma Hubungan Kerja dan Perlindungan Berserikat
			500.15.16.3	Pengawasan Norma Penempatan dan Latihan Tenaga Kerja
		500.15.17	Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak	
			500.15.17.1	Pengawasan Norma Kerja Perempuan
			500.15.17.2	Pengawasan Norma Kerja Anak
			500.15.17.3	Kerjasama Lintas Sektoral
			500.15.17.4	Advokasi Tenaga Kerja Perempuan dan Anak
		500.15.18	Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	
			500.15.18.1	Pengawasan Norma

				Mekanik, Pesawat Uap dan Bejana Tekan
			500.15.18.2	Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran
			500.15.18.3	Pengawasan Norma Kesehatan Kerja
			500.15.18.4	PengawasanNorma Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya
			500.15.18.5	Pengawasan Norma Kelembagaan, Keahlian dan Sistem Manajemen K3
		500.15.19	Laporan Hasil Pengawasan Ketenagaakerjaan	
		500.15.20	Bina Penegakan Hukum	
			500.15.20.1	Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan
			500.15.20.2	Penyidikan Norma Ketenagakerjaan
			500.15.20.3	Pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
			500.15.20.4	Kerjasama Penegakan Hukum
		500.15.21	Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	
			500.15.21.1	Analisis dan Standardisasi bidang K 3
			500.15.21.2	Hasilkajian, perekayasaan dan penerapan teknologi dan alih teknologi K 3
			500.15.21.3	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengkajian K 3
			500.15.21.4	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelayanan K3
		500.15.22	Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	
			500.15.22.1	Program, Analisis dan Standardisasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
			500.15.22.2	PenyebarluasanInformasi Pengembangan SDM dan

				Kompetensi K3
			500.15.22.3	Kerjasama Tingkat Nasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
			500.15.22.4	Kerjasama Tingkat Regional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
			500.15.22.5	Kerjasama Tingkat Internasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
			500.15.22.6	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
	500.16	PENANAMAN MODAL		
		500.16.1	Kebijakan di bidang Penanaman Modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		500.16.2	Perencanaan Penanaman Modal	
			500.16.2.1	Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya
			500.16.2.2	Perencanaan Industri Manufaktur
			500.16.2.3	Perencanaan Jasa dan Kawasan
			500.16.2.4	Perencanaan Infrastruktur
		500.16.3	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
			500.16.3.1	Deregulasi Penanaman Modal
			500.16.3.2	Pengembangan Potensi Daerah
			500.16.3.3	Pemberdayaan Usaha
			500.16.3.4	Pemberdayaan Usaha Pembinaan dan Penyuluhan
			500.16.3.5	Pemberdayaan Usaha Kemitraan Usaha
			500.16.3.6	Pemberdayaan Usaha Pelayanan Usaha
		500.16.4	Promosi Penanaman Modal	
			500.16.4.1	Pengembangan Promosi
			500.16.4.2	Analisis Strategi Promosi
			500.16.4.3	Fasilitasi Promosi Luar Negeri

			500.16.4.4	Promosi Sektoral
			500.16.4.5	Fasilitasi Promosi Daerah
			500.16.4.6	Pameran dan Sarana Promosi
		500.16.5	Kerja Sama Penanaman Modal	
			500.16.5.1	Kerja Sama Bilateral dan Mulitilateral
			500.16.5.2	Kerja Sama Regional
			500.16.5.3	Kerja Sama Dunia Usaha Internasional
		500.16.6	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
			500.16.6.1	Pemantauan Penanaman Modal
			500.16.6.2	Data Realisasi Penanaman Modal
			500.16.6.3	Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal
			500.16.6.4	Fasilitasi Penyelesaian Masalah
			500.16.6.5	Pengawasan Penanaman Modal
			500.16.6.6	Pencabutan/Pembatalan Perizinan Penanaman Modal
		500.16.7	Pelayanan Penanaman Modal	
			500.16.7.1	Pelayanan Aplikasi
			500.16.7.2	Pelayanan Perijinan
			500.16.7.3	Pelayanan Konsultasi Perijinan
			500.16.7.4	Pelayanan Non Perijinan
			500.16.7.5	Pelayanan Fasilitas
	500.17	PERTANAHAN		
		500.17.1	Kebijakan di bidang Pertanahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		500.17.2	Pengadaan dan Penataan Administrasi Pertanahan	
			500.17.2.1	Fasilitasi Pengadaan Tanah
			500.17.2.2	Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan
			500.17.2.3	Data dan Informasi Pertanahan
			500.17.2.4	Advokasi dan Pengendalian
		500.17.3	Penatagunaan dan Penguatan Hak Atas Tanah	

			500.17.3.1	Penatagunaan Tanah
			500.17.3.2	Data dan Pemetaan Tematik
			500.17.3.3	Penguatan Atas Tanah
		500.17.4	Sengketa Tanah	
			500.17.4.1	Pengkajian dan Penanganan Sengketa
			500.17.4.2	Advokasi dan Pengendalian
	500.18	TRANSMIGRASI		
		500.18.1	Kebijakan di bidang Transmigrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		500.18.2	Penyediaan Tanah Transmigrasi	
			500.18.2.1	Fasilitasi Pengadaan Tanah
			500.18.2.2	Pengurusan Legalitas Tanah
			500.18.2.3	Dokumentasi Pertanahan
			500.18.2.4	Advokasi Pertanahan
		500.18.3	Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi	
			500.18.3.1	Penyiapan Lahan
			500.18.3.2	Penyiapan Sarana
			500.18.3.3	Penyiapan Prasarana
			500.18.3.4	Evaluasi Kelayakan Permukiman
		500.18.4	Fasilitasi Penempatan Transmigrasi	
			500.18.4.1	Penyiapan Calon Transmigrasi
			500.18.4.2	Penyiapan Perpindahan
			500.18.4.3	Pelaksanaan Perpindahan
			500.18.4.4	Penataan dan Adaptasi
		500.18.5	Partisipasi Masyarakat	
			500.18.5.1	Promosi dan Motivasi
			500.18.5.2	Kerjasama Kelembagaan
			500.18.5.3	Kerjasama Antar Daerah
			500.18.5.4	Pelayanan Investasi
		500.18.6	Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	
			500.18.6.1	Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan
			500.18.6.2	Bina Sistem Informasi
			500.18.6.3	Perencanaan Pengembangan Kawasan
			500.18.6.4	Perencanaan Pengembangan

				Masyarakat
			500.18.6.5	Perencanaan Pengembangan Pusat Pertumbuhan
		500.18.7	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat	
			500.18.7.1	Bantuan Pangan dan Kesehatan
			500.18.7.2	Fasilitas Sosial Budaya
			500.18.7.3	Pengembangan Kelembagaan
			500.18.7.4	Bina Pendampingan Masyarakat Transmigrasi
		500.18.8	Pengembangan Usaha	
			500.18.8.1	Kewirausahaan
			500.18.8.2	Produksi
			500.18.8.3	Pengolahan Hasil dan Pemasaran
			500.18.8.4	Lembaga Ekonomi dan permodalan
		500.18.9	Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan	
			500.18.9.1	Analisis dan Standarisasi Sarana dan Prasarana
			500.18.9.2	Pengembangan Sarana
			500.18.9.3	Pengembangan Prasarana
			500.18.9.4	Evaluasi Pengembangan Sarana dan Prasarana
		500.18.10	Penyerasian Lingkungan	
			500.18.10.1	Persiapan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
			500.18.10.2	Adaptasi dan Mitigasi Lingkungan
			500.18.10.3	Evaluasi Perkembangan Permukiman Transmigrasi
			500.18.10.4	Evaluasi Perkembangan Pusat Pertumbuhan
600	PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN			
	600.1	PEKERJAAN UMUM		
		600.1.1	Kebijakan di bidang Pekerjaan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		600.1.2	Penatagunaan Sumber Daya Air	
			600.1.2.1	Perencanaan Wilayah Sungai
			600.1.2.2	Kelembagaan

			600.1.2.3	Pemanfaatan Sumber Daya Air
			600.1.2.4	Hidrologi dan Lingkungan Sumber Daya Air
			600.1.2.5	Pengaturan dan Pemantauan
		600.1.3	Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air	
			600.1.3.1	Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air
			600.1.3.2	Manajemen Mutu
			600.1.3.3	Informasi dan Data Sumber Daya Air
			600.1.3.4	Keterpaduan Pemrograman
		600.1.4	Pengelolaan Sumber Daya Air	
			600.1.4.1	Pengelolaan Sungai dan Pantai
			600.1.4.2	Pengelolaan Irigasi dan Rawa
			600.1.4.3	Pengelolaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung
			600.1.4.4	Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku
		600.1.5	Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	
			600.1.5.1	Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai
			600.1.5.2	Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa
			600.1.5.3	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung
			600.1.5.4	Operasi dan Pemeliharaan Air Tanah dan Air Baku
			600.1.5.5	Operasi dan Pemeliharaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo
		600.1.6	Pengendalian Lumpur Sidoarjo (BencanaLokal Lingkup Nasional)	
			600.1.6.1	Perencanaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo

			600.1.6.2	Pemrograman Pengendalian Lumpur Sidoarjo
			600.1.6.3	Pelaksanaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo
			600.1.6.4	Pengendalian DampakSosial, Ekonomi, dan Lingkungan akibat Lumpur Sidoarjo
			600.1.6.5	Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
		600.1.7	Pengembangan Jaringan Jalan	
			600.1.7.1	Keterpaduan Perencanaan
			600.1.7.2	Sistem Jaringan Jalan
			600.1.7.3	Lingkungan dan Keselamatan Jalan
		600.1.8	Pembangunan Jalan	
			600.1.8.1	Standar dan Pedoman
			600.1.8.2	Manajemen Konstruksi
			600.1.8.3	Pengelolaan Gedometrik, Perkerasan, dan Drainage
			600.1.8.4	Pengelolaan Geoteknik dan Manajemen Lereng
		600.1.9	Preservasi Jalan	
			600.1.9.1	Standar dan Pedoman
			600.1.9.2	Perencanaan Teknis
			600.1.9.3	Teknik Rekonstruksi
			600.1.9.4	Teknik Pemeliharaan Jalan
		600.1.10	Pengelolaan Jembatan	
			600.1.10.1	Standar dan Pedoman
			600.1.10.2	Perencanaan Teknis
			600.1.10.3	Teknik Jembatan
			600.1.10.4	Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus
		600.1.11	Pengelolaan Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitas Jalan Daerah	
			600.1.11.1	Bimbingan Teknik Jalan Daerah
			600.1.11.2	Pengembangan Jalan Metropolitan dan Kota Besar
			600.1.11.3	Pembinaan Teknik Jalan Bebas Hambatan
		600.1.12	Pengaturan Jalan Tol	

			600.1.12.1	Persiapan pengusahaan jalan tol
			600.1.12.2	Pengadaan Investasi Jalan Tol
			600.1.12.3	Teknik Pengaturan Jalan Tol
			600.1.12.4	Pengambil alihan hak pengusahaan jalan tol
		600.1.13	Keterpaduan Infrastruktur Permukiman	
			600.1.13.1	Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan
			600.1.13.2	Keterpaduan Pembiayaan dan Pelaksanaan
		600.1.14	Pengembangan Kawasan Permukiman	
			600.1.14.1	Perencanaan Teknis
			600.1.14.2	Kawasan Permukiman Perkotaan
			600.1.14.3	Kawasan Permukiman Pedesaan
			600.1.14.4	Kawasan Permukiman Khusus
			600.1.14.5	Kelembagaan
		600.1.15	Pembinaan Penataan Bangunan	
			600.1.15.1	Perencanaan Teknis
			600.1.15.2	Penataan Bangunan Gedung
			600.1.15.3	Pengelolaan Rumah Negara
			600.1.15.4	Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus
			600.1.15.5	Kelembagaan
		600.1.16	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
			600.1.16.1	Perencanaan Teknis
			600.1.16.2	Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan
			600.1.16.3	Sistem Penyediaan Air Minum Pedesaan
			600.1.16.4	Sistem Penyediaan Air Minum Khusus
			600.1.16.5	Kelembagaan
			600.1.16.6	Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
			600.1.16.7	Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja
		600.1.17	Pengembangan Penyehatan Lingkungan	

			Permukiman	
			600.1.17.1	Perencanaan Teknis
			600.1.17.2	Pengelolaan Air Limbah
			600.1.17.3	Pengelolaan Persampahan
			600.1.17.4	Penyehatan Lingkungan Permukiman Khusus
			600.1.17.5	Kelembagaan
			600.1.17.6	Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja
		600.1.18	Pemantauan dan Evaluasi	
	600.2	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN		
		600.2.1	Kebijakan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		600.2.2	Perencanaan Pembiayaan Perumahan	
			600.2.2.1	Keterpaduan Perencanaan
			600.2.2.2	Strategi Pembiayaan dan Analisa Pasar Perumahan
			600.2.2.3	Kemitraan
		600.2.3	Pola Pembiayaan Perumahan	
			600.2.3.1	Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Umum
			600.2.3.2	Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Swadaya dan Mikro Perumahan
			600.2.3.3	Pola Investasi Perumahan
		600.2.4	Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan	
			600.2.4.1	Sumber Pembiayaan Primer
			600.2.4.2	Sumber Pembiayaan Sekunder
			600.2.4.3	Sumber Tabungan Perumahan dan Pembiayaan Lainnya
			600.2.4.4	Sistem Pembiayaan Perumahan
			600.2.4.5	Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan
		600.2.5	Perencanaan Penyediaan Perumahan	
			600.2.5.1	Keterpaduan Perencanaan
			600.2.5.2	Analisa Teknik

			600.2.5.3	Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian
			600.2.5.4	Kemitraan dan Kelembagaan
		600.2.6	Penyediaan Rumah Susun	
			600.2.6.1	Perencanaan Teknik
			600.2.6.2	Penyediaan
			600.2.6.3	Penghunian,Pengalihan,dan Pemanfaatan
			600.2.6.4	Pengelolaan
		600.2.7	Penyediaan Rumah Khusus	
			600.2.7.1	Perencanaan Teknik
			600.2.7.2	Penyediaan dan Pengelolaan Rumah Tapak Khusus
			600.2.7.3	Bimbingan teknis dan supervisi
			600.2.7.4	Penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya
			600.2.7.5	Perencanaan Teknik
			600.2.7.6	Fasilitas Backlog Rumah Swadaya dan Rumah Tidak Layak Huni
			600.2.7.7	Pelaksanaan Bantuan Simultan
		600.2.8	Penyediaan Rumah Umum dan Komersial	
			600.2.8.1	Perencanaan Teknik
			600.2.8.2	Pemberian Bantuan Rumah Umum
			600.2.8.3	Fasilitasi Hunian Berimbang
			600.2.8.4	Fasilitasi Penyediaan Lahan Perumahan
		600.2.9	Investasi Infrastruktur	
			600.2.9.1	Pelaksanaan Kebijakan Investasi Infrastruktur
			600.2.9.2	Sinkronisasi Investasi Infrastruktur
			600.2.9.3	Fasilitasi dan Mitigasi Risiko Investasi Infrastruktur
			600.2.9.4	Pasar Infrastruktur
		600.2.10	Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	
			600.2.10.1	Sistem Penyelenggaraan
			600.2.10.2	Kontrak Konstruksi
			600.2.10.3	Konstruksi Berkelanjutan
			600.2.10.4	Manajemen Mutu

		600.2.11	Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi	
			600.2.11.1	Kelembagaan
			600.2.11.2	Material dan Peralatan Konstruksi
			600.2.11.3	Teknologi Konstruksi dan Produksi Dalam Negeri
			600.2.11.4	Usaha Jasa Konstruksi
		600.2.12	Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	
			600.2.12.1	Standar dan Materi Kompetensi
			600.2.12.2	Penerapan Kompetensi
			600.2.12.3	Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi
			600.2.12.4	Pengembangan Produktivitas
		600.2.13	Peningkatan Kerjasamadan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	
			600.2.13.1	Peningkatan Kerjasama
			600.2.13.2	Pemberdayaan Jasa Konstruksi
		600.2.14	Peningkatan Jasa Konstruksi	
			600.2.14.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Kerja
			600.2.14.2	Pelaksanaan Pengendalian Mutu
		600.2.15	Penerapan Teknologi Konstruksi	
			600.2.15.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Kerjasama Penerapan Teknologi Konstruksi
			600.2.15.2	Pengembangan Materi
			600.2.15.3	Pendayagunaan Material dan Peralatan Konstruksi
		600.2.16	Rencana Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Perumahan Rakyat (PUPR)	
			600.2.16.1	Antar Sektor
			600.2.16.2	Antar Wilayah
		600.2.17	Pengembangan Kawasan Strategis	
			600.2.17.1	Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis
			600.2.17.2	Pengembangan Infrastruktur Antarkawasan Strategis
		600.2.18	Pengembangan Kawasan Perkotaan	
			600.2.18.1	Pengembangan

				Infrastruktur Kawasan Metropolitan
			600.2.18.2	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Besar dan Kota Baru
			600.2.18.3	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Kecil dan Pedesaan
			600.2.18.4	Analisa Manfaat dan Skema Pembiayaan
			600.2.18.5	Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan Rakyat (PUPR)
		600.2.19	Pemantauan dan Evaluasi	
	600.3	TATA RUANG (TATA KOTA)		
		600.3.1	Kebijakan di bidang Tata Ruang yang dilakukan Pemerintahan Daerah	
		600.3.2	Perencanaan	
			600.3.2.1	Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RT/RW)
			600.3.2.2	Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
			600.3.2.3	Rencana Tata RuangStrategis Kabupaten
			600.3.2.4	Rencana Tata Bangun Lingkungan (RTBL)
			600.3.2.5	Rencana Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana Kabupaten
			600.3.2.6	Rencana Teknis Prasarana Kota
			600.3.2.7	Rencana Teknis Rencana Peremajaan dan Pengembangan Kotas Prasarana Kota
		600.3.3	Pemanfaatan dan Pengendalian	
			600.3.3.1	Evaluasi dan Pengawasan Penata Ruang
			600.3.3.2	Ijin Pemanfaatan Ruang
			600.3.3.3	Pembatalan Ijin Pemanfaatan Ruang
		600.3.4	Pemetaan	
			600.3.4.1	Peta Dasar
			600.3.4.2	Survey Pemetaan Ruang Darat

			600.3.4.3	Survey Pemetaan Ruang Air
			600.3.4.4	Survey Pemetaan Ruang Udara
	600.4	LINGKUNGAN HIDUP		
		600.4.1	Kebijakan di bidang Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		600.4.2	Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	
			600.4.2.1	Inventarisasi, Penerapan ekoregion, dan rencana perlindungan dan pengelolaan Lingkungan
			600.4.2.2	Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam
		600.4.3	Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor	
			600.4.3.1	Evaluasi Penerapan
			600.4.3.2	Perencanaan Lingkungan Hidup
		600.4.4	Ekonomi Lingkungan	
		600.4.5	Dampak Lingkungan	
			600.4.5.1	Bimtek Dampak Lingkungan
			600.4.5.2	Penerapan sistem kebijakan Dampak lingkungan
			600.4.5.3	Evaluasi dan Tindak Lanjut
		600.4.6	Pemantauan dan Pengawasan	
			600.4.6.1	Manufaktur Prasarana dan Jasa
			600.4.6.2	Pertambangan Energi, Minyak dan Gas
			600.4.6.3	Agro Industri dan Usaha Skala Kecil
			600.4.6.4	Udara Sumber Bergerak
		600.4.7	Evaluasi dan Pengembangan	
			600.4.7.1	Manufaktur, Prasarana, dan Jasa
			600.4.7.2	Pertambangan Energi, Minyak dan Gas
			600.4.7.3	Agro Industri dan Usaha Skala Kecil
			600.4.7.4	Udara Sumber Bergerak
		600.4.8	Keanekaragaman Hayati dan pengendalian Kerusakan Lahan	
			600.4.8.1	Pengembangan
			600.4.8.2	Pemanfaatan

			600.4.8.3	Pengelolaan Sumber Daya Genetik
			600.4.8.4	Keamanan Hayati
			600.4.8.5	Pengendalian kerusakan Lahan
		600.4.9	Kerusakan Ekosistem Perairan Darat	
			600.4.9.1	Kerusakan Ekosistem
			600.4.9.2	Rawa
		600.4.10	Mitigasi dan pelestarian Fungsi Atmosfer	
			600.4.10.1	Perangkat mitigasi
			600.4.10.2	Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca
			600.4.10.3	Pengendalian Bahan Perusak Ozon
			600.4.10.4	Pengendalian Kerusakan Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan
		600.4.11	Adaptasi Perubahan Iklim	
			600.4.11.1	Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim antara lain: Pengembangan perangkat Adaptasi Perubahan Iklim, Pemantauan dan Evaluasi Adaptasi Perusahaan Iklim
			600.4.11.2	Kerentanan Perubahan Iklim
		600.4.12	Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun	
			600.4.12.1	Registrasi dan Notifikasi
			600.4.12.2	Pemantauan Bahan Berbahaya dan Beracun
			600.4.12.3	Evaluasi dan Tindak Lanjut
		600.4.13	Verifikasi Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya dan beracun	
			600.4.13.1	Pengumpulan dan pemanfaatan
			600.4.13.2	Pengangkutan dan Pengolahan
			600.4.13.3	Penimbunan dan Dumping
			600.4.13.4	Notifikasi dan Rekomendasi Limbah Lintas batas
		600.4.14	Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan	

			Kontaminasi Limbah B3	
			600.4.14.1	Pemantauan
			600.4.14.2	Tanggap darurat dan pemelihan Kontaminasi
		600.4.15	Pengelolaan Sampah	
			600.4.15.1	Pembatasan sampah
			600.4.15.2	Daur Ulang dan Pemanfaatan Sampah
			600.4.15.3	Pembentukan Dewan Adipura
			600.4.15.4	Penetapan pemenang adipura
		600.4.16	Hukum Administrasi Lingkungan	
			600.4.16.1	Pengelolaan dan pengembangan pengaduan
			600.4.16.2	Penataan hukum administrasi lingkungan
		600.4.17	Penyelesaian Sengketa Lingkungan	
			600.4.17.1	Penyelesaian sengketa Melalui Pengadilan
			600.4.17.2	Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan
		600.4.18	Penegakan hukum pidana lingkungan	
			600.4.18.1	Penyidikan
			600.4.18.2	Koordinasi penuntutan, evaluasi, dan tindak lanjut
			600.4.18.3	Koordinasi pembinaan penyidik PNS
		600.4.19	Komunikasi Lingkungan	
			600.4.19.1	Pengembangan Komunikasi
			600.4.19.2	Publikasi dan Kampanye
		600.4.20	Penguatan Inisiatif Masyarakat	
			600.4.20.1	Komunitas Pendidikan Lingkungan
			600.4.20.2	Kearifan Lingkungan
		600.4.21	Peningkatan Peran Masyarakat	
			600.4.21.1	Masyarakat Perkotaan
			600.4.21.2	Masyarakat Pedesaan
		600.4.22	Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan	
			600.4.22.1	Organisasi Sosial Masyarakat
			600.4.22.2	Organisasi Profesi Dunia

				Usaha
		600.4.23	Data dan Informasi Lingkungan	
			600.4.23.1	Pengelolaan Data
			600.4.23.2	Pengelolaan Informasi
			600.4.23.3	Pengembangan Perangkat Lunak
			600.4.23.4	Pengembangan Sistem dan Layanan Jaringan
		600.4.24	Kelembagaan Lingkungan	
			600.4.24.1	Kelembagaan dan Tata Laksana
			600.4.24.2	Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal
		600.4.25	Standarisasi dan teknologi	
			600.4.25.1	Standarisasi Manajemen dan dan Pengujian Lingkungan
			600.4.25.2	Standarisasi Kompetensi Keahlian dan Lembaga Penyedia Jasa Lingkungan
			600.4.25.3	Teknologi Ramah Lingkungan
		600.4.26	Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan	
			600.4.26.1	Pemantauan dan Kajian Kualitas Lingkungan
			600.4.26.2	Laboratorium Rujukan dan Pengujian
700	PENGAWASAN			
	700.1	PENGAWASAN INTERNAL		
		700.1.1	Rencana Pengawasan	
			700.1.1.1	Rencana Strategis Pengawasan
			700.1.1.2	Rencana Kerja Pengawas Tahunan
			700.1.1.3	Rencana Kinerja Tahunan
			700.1.1.4	Rencana dan Penetapan Kinerja Tahunan
			700.1.1.5	Rakor Pengawasan Tingkat Daerah
		700.1.2	Pelaksanaan Pengawasan	
			700.1.2.1	Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil

				Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang memerlukan tindak lanjut (TL)
			700.1.2.2	Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut
			700.1.2.3	Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut
			700.1.2.4	Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat
			700.1.2.5	Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan
			700.1.2.6	Laporan Perkembangan Barang Milik Negara
			700.1.2.7	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi
			700.1.2.8	Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Review
			700.1.2.9	Good Corporate Governance (GCG)
800	KEPEGAWAIAN			
	800.1	SUMBER DAYA MANUSIA		
		800.1.1	Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara	
			800.1.1.1	Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara Antara lain: Bahan penyusunan rencana kebutuhan, Analisis Kebutuhan, Pengolahan

				data kebutuhan
			800.1.1.2	Perencanaan Pertimbangan Formasi Antara lain: Pertimbangan teknis penetapan formasi ASN, Pertimbangan teknis penetapan formasi ikatan dinas
			800.1.1.3	Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara
			800.1.1.4	Standarisasi Jabatan Antara lain: Informasi Jabatan, Kompetensi Jabatan, Klasifikasi Jabatan
		800.1.2	Formasi dan Pengadaan Pegawai	
			800.1.2.1	Formasi ASN Antara lain: Usulan formasi, Usulan permintaan formasi kepada Menpan RB dan Kepala BKN, Persetujuan Formasi, Penetapan Formasi, Penetapan Formasi Khusus
			800.1.2.2	Proses Rekrutmen/Pengadaan ASN Antara lain: Proses Rekrutmen ASN, Penetapan Pengumuman Kelulusan ASN
			800.1.2.3	Pengumuman Kelulusan ASN
			800.1.2.4	Berkas Lamaran Yang Tidak Diterima
			800.1.2.5	Pengangkatan ASN
			800.1.2.6	Open Biding (Seleksi Terbuka Jabatan)
			800.1.2.7	Pengelolaan Sistem Rekrutmen ASN
			800.1.2.8	Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi ASN
		800.1.3	Mutasi Pegawai	
			800.1.3.1	Usulan Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja,

				Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi antar Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, Persetujuan/PertimbanganKepala BKN
			800.1.3.2	KenaikanPangkat/Golongan/ Jabatan
			800.1.3.3	Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Struktural/Fungsional
			800.1.3.4	Perubahan Data Dasar/Status/Kedudukan Hukum Pegawai
			800.1.3.5	Peninjauan Masa Kerja
			800.1.3.6	Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT)
		800.1.4	Pengembangan Karir	
			800.1.4.1	Usulan Tugas Belajar/ Ijin Belajar/ Diklat/ Kursus/ Magang/ Ujian Dinas/ Praktek Kerja di Instansi lain/ Pertukaran antar ASN dengan pegawai swasta
			800.1.4.2	Penyesuaian ijazah
			800.1.4.3	Penyusunan Sistem Karier
			800.1.4.4	Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja
			800.1.4.5	Angka Kredit Antara lain: Pengajuan Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit, Penilaian Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit
		800.1.5	Kinerja Aparatur Sipil Negara	
			800.1.5.1	Hasil Penilaian Kinerja dan Standar Kerja
			800.1.5.2	Pengelolaan Database dan Analisis Sistem Informasi Kinerja

			800.1.5.3	Evaluasi dan Pemantauan Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja
		800.1.6	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN	
			800.1.6.1	Kode Etik Pegawai
			800.1.6.2	Disiplin
			800.1.6.3	Pemberhentian Dengan Hormat
			800.1.6.4	Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
			800.1.6.5	Pemberhentian Sementara
			800.1.6.6	Pensiun ASN Antara lain: Administrasi Pensiun ASN, Penetapan Pensiun ASN, Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun ASN, Pensiun Pejabat Negara dan Janda/ Dudanya
		800.1.7	Bantuan Hukum	
		800.1.8	Status dan Kedudukan Pegawai	
			800.1.8.1	Status Kepegawaian
			800.1.8.2	Kedudukan Kepegawaian
			800.1.8.3	Keberatan Pegawai
			800.1.8.4	Perselisihan/Sengketa Kepegawaian
		800.1.9	Sistem Informasi Kepegawaian	
			800.1.9.1	Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian
			800.1.9.2	Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian
			800.1.9.3	Pengembangan Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Elektonik
			800.1.9.4	Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Fisik
		800.1.10	Pengawasan dan pengendalian	
			800.1.10.1	Formasi, Pengadaan dan Pasca Diklat
			800.1.10.2	Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dalam Jabatan

			800.1.10.3	Gaji dan Tunjangan, Kesejahteraan dan Kinerja
			800.1.10.4	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN
			800.1.10.5	Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian
			800.1.10.6	Sanggahan terhadap Permasalahan Tenaga Honorer
		800.1.11	Administrasi Pegawai	
			800.1.11.1	Surat Perintah Dinas/Surat Tugas
			800.1.11.2	Cuti Sakit
			800.1.11.3	Cuti Bersalin
			800.1.11.4	Cuti Tahunan
			800.1.11.5	Cuti Alasan Penting
			800.1.11.6	Cuti Besar
			800.1.11.7	Cuti Di luar Tanggungan Negara
			800.1.11.8	Karpeg/KPE/Karis/Karsu
			800.1.11.9	Keanggotaan Organisasi Profesi/ Kedinasan
			800.1.11.10	Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)
			800.1.11.11	Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)
			800.1.11.12	Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
			800.1.11.13	Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi Gaji/ tunjangan
		800.1.12	Kesejahteraan Pegawai	
			800.1.12.1	Pemeliharaan Kesehatan Pegawai
			800.1.12.2	Asuransi Pegawai/BPJS
			800.1.12.3	Tabungan Perumahan
			800.1.12.4	Bantuan Sosial
			800.1.12.5	Pakaian Dinas
			800.1.12.6	Layanan Pegawai yang Meninggal Karena Dinas
			800.1.12.7	Pemberian Tali Kasih
			800.1.12.8	Pemberian Piagam

				Penghargaan dan Tanda Jasa
			800.1.12.9	Olahraga dan Rekreasi
			800.1.12.10	Rekam Medis
		800.1.13	Administrasi Perseorangan	
			800.1.13.1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)
			800.1.13.2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
			800.1.13.3	Pejabat Negara dan pejabat lainnya yang disetarakan
			800.1.13.4	Sekretaris Daerah
			800.1.13.5	ASN berjasa/terlibat dalam peristiwa berskala nasional
		800.1.14	Penilaian Kompetensi	
			800.1.14.1	Penilaian Kompetensi
			800.1.14.2	Hasil Penilaian Kompetensi
	800.2	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
		800.2.1	Kebijakan di bidang Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		800.2.2	Pendidikan dan Pelatihan	
			800.2.2.1	Sistem Informasi program dan pembinaan diklat
			800.2.2.2	Pedoman-pedoman kediklatan
			800.2.2.3	Kurikulum-kurikulum diklat
			800.2.2.4	Modul-modul diklat
			800.2.2.5	Panduan fasilitator
			800.2.2.6	Saran/rekomendasi penyelenggaraan diklat
			800.2.2.7	Notulen sosialisasi/Rapat Koordinasi Kebijakan Diklat
			800.2.2.8	Monitoring dan evaluasi program dan pembinaan diklat
			800.2.2.9	Konsultasi, advokasi, asistensi diklat
		800.2.3	Widyaiswara	
			800.2.3.1	Seleksi dan

				pengembangan Widyaiswara
			800.2.3.2	Sertifikasi Widyaiswara
			800.2.3.3	Monitoring dan evaluasi Widyaiswara
			800.2.3.4	Penilaian Widyaiswara
			800.2.3.5	Konsultasi, advokasi dan asistensi Widyaiswara
			800.2.3.6	Sistem Informasi Pembinaan Widyaiswara
		800.2.4	Penyelenggaraan Diklat	
			800.2.4.1	Perencanaan; peserta, pengajar, penjadwalan Penyelenggaraan Diklat
			800.2.4.2	Penyelenggaraan Penyelenggaraan Diklat
			800.2.4.3	Konsultasi, advokasi, asistensi penyelenggaraan diklat
			800.2.4.4	Pengembangan bahan ajar dan metodologi pembelajaran
			800.2.4.5	Sistem informasi diklat
			800.2.4.6	Monitoring Penyelenggara Diklat
			800.2.4.7	Monitoring dan evaluasi Pasca diklat
		800.2.5	Alumni	
900	KEUANGAN			
	900.1	KEUANGAN DAERAH		
		900.1.1	Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P)	
			900.1.1.1	Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA)
			900.1.1.2	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD)
			900.1.1.3	Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan
			900.1.1.4	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P)

		900.1.2	Penyusunan Anggaran	
			900.1.2.1	Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kecamatan
			900.1.2.2	Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota
			900.1.2.3	Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah
			900.1.2.4	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
		900.1.3	Pelaksanaan Anggaran	
			900.1.3.1	Surat Penyedia Dana (SPP, SPM dan SP2D): UP, GU, TU, LS
			900.1.3.2	Pendapatan
			900.1.3.3	Belanja
			900.1.3.4	Pembiayaan Daerah
			900.1.3.5	Dokumen Penatausahaan Keuangan
			900.1.3.6	Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
			900.1.3.7	Daftar Gaji
			900.1.3.8	Kartu Gaji
			900.1.3.9	Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD)
			900.1.3.10	Laporan Keuangan
		900.1.4	Pinjaman/Hibah Luar Negeri	
			900.1.4.1	Permohonan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (Blue Book)
			900.1.4.2	Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (Green Book)
			900.1.4.3	Dokumen Memorandum of Understanding (MoU), dan dokumen sejenisnya
			900.1.4.4	Dokumen Loan Agremeent (PHLN) Antara lain: Draft Agreement,

				Legal Opinion, Surat Menyurat dengan Lender
			900.1.4.5	Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri, antara lain: usulan luncuran dana
			900.1.4.6	Aplikasi Penarikan Dana BLN berikut lampirannya
			900.1.4.7	Dokumen Otorisasi Penarikan Dana (Payment Advice)
			900.1.4.8	Dokumen Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri, yaitu: Surat Perintah Pencairan Dana, SPM beserta lampirannya, a.l.: SPP, Kontrak, BA, dan data pendukung lainnya.
			900.1.4.9	Replenishment (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor) meliputi antara lain: No Objection Letter (NOL), Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization (WA),
			900.1.4.10	Staff Appraisal Report
			900.1.4.11	Report /Laporan
			900.1.4.12	Laporan Hutang Daerah
			900.1.4.13	Completion Report/Annual Report
			900.1.4.14	Ketentuan/Peraturan yang menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri
		900.1.5	Pengelolaan APBD/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)	
		900.1.6	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)	
			900.1.6.1	Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)
			900.1.6.2	Dokumen Kebijakan Akuntansi
			900.1.6.3	Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi
			900.1.6.4	Laporan Realisasi

				Anggaran dan Neraca Bulanan /Triwulanan /Semesteran
		900.1.7	Penyaluran Anggaran Tugas Pembantuan	
			900.1.7.1	Surat Penetapan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek, Bendahara, atas Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembantuan, termasuk Specimen Tanda Tangan
			900.1.7.2	Berkas Permintaan Pembayaran (SPP) dan lampirannya: SPP-SPP-Daftar Perincian Penggunaan SPPR-SPDR-L, SPM-LS, SPM-DU, bilyet giro, SPM Nihil, Penagihan/Invoice, Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta Bukti Pendukungnya a.l.: Copy Faktur Pajak dan Nota Kredit Bank, Permintaan Pelayanan Jasa/Service Report dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
			900.1.7.3	Buku Rekening Bank
			900.1.7.4	Keputusan Pembukuan Rekening
			900.1.7.5	Pembukuan anggaran terdiri antara lain: Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Register dan Buku Tambahan, Daftar Pembukuan Pencairan/Pengeluaran (DPP), Daftar Himpunan Pencairan (DHP), dan Rekening Koran
		900.1.8	Penerimaan Anggaran Tugas Pembantuan	
			900.1.8.1	Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan termasuk Dana Sisa atau Pengeluaran lainnya
			900.1.8.2	Berkas Penerimaan Pajak termasuk PPh 21, PPh 22,

				PPh 23, dan PPn dan Denda Keterlambatan Menyelesaikan Pekerjaan
		900.1.9	Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan Pemilu Dari APBD meliputi: Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu, Peraturan/Pedoman/Standar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasional dan Kontingensi untuk Biaya Pilkada dan Bantuan Pemilu, Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KPUD dan Panwasda Kota, PPK, PPS, KPPS dan Permohonan Pengajuan RKA KPUD dan Panwas, Berkas Pembahasan RKA Pilkada dan Bantuan Pemilu, Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pilkada dan Bantuan Pemilu Kota, Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada KPUD dan Panwas Kota dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada, Bahan Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pilkada, dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Nota Persetujuan DPRD tentang Perda APBD Pilkada dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD	
		900.1.10	Pelaksanaan Anggaran PILKADA dan Anggaran Biaya Bantuan Pemilu	
			900.1.10.1	Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD, Bendahara Panwasda dan Bendahara pada Panitia Pilkada dan Pemilu
			900.1.10.2	Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Pengadaan Jasa, Bunga, Pelaksanaan Pilkada/Pemilu
			900.1.10.3	Berkas setor sisa dana Pilkada/Pemilu termasuk setor komisi pengadaan barang/jasa, rabat, bunga, jasa giro Berkas Penyaluran Biaya Pemilu termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank
			900.1.10.4	Pedoman Dokumen

				Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu termasuk Perubahan/Pergeseran/ Revisinya
		900.1.11	Pemeriksaan/Pengawasan Keuangan Daerah	
			900.1.11.1	Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan
			900.1.11.2	Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal
			900.1.11.3	Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional
			900.1.11.4	Dokumen Penyelesaian Kerugian Daerah
		900.1.12	Anggaran Daerah	
			900.1.12.1	Anggaran Daerah
			900.1.12.2	Dukungan Teknis Anggaran Daerah
		900.1.13	Pendapatan dan Investasi Daerah	
			900.1.13.1	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Antara lain: fasilitasi pelaksanaan kebijakan standardisasi pajak daerah dan retribusi daerah, penyiapan bahan perumusan bimbingan teknis pajak daerah dan retribusi daerah, penyiapan bahan perumusan analisis dan evaluasi, pemantauan pajak daerah dan retribusi daerah, penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah
			900.1.13.2	Badan Usaha Milik Daerah Antara lain: fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang usaha milik daerah lembaga

				keuangan, fasilitas serta bimbingan teknis di bidang badan usaha milik daerah lembaga non keuangan, penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi badan usaha milik daerah
			900.1.13.3	Badan Layanan Umum Daerah Antara lain: analisis, standardisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, Pembinaan pelaksanaan kebijakan, standardisasi teknis, prosedur dan kriteria, fasilitasi serta bimbingan teknis penerapan pola pengelolaan keuangan keuangan badan layanan umum daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah
			900.1.13.4	Pengelolaan Kekayaan Daerah Antara lain: fasilitasi serta bimbingan teknis pengelolaan kekayaan, Fasilitasi serta bimbingan teknis investasi daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan kekayaan dan investasi daerah
			900.1.13.5	Pinjam Dan Obligasi Daerah Antara lain: fasilitasi pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah kepada pemerintah daerah dan/atau badan usaha milik daerah,

				Fasilitasi pelaksanaan kebijakan obligasi daerah, Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dana bergulir yang bersumber dari APBN, Bimbingan teknis obligasi daerah, dana bergulir serta penyertaan modal daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pinjaman dan hibah, obligasi daerah, dan dana bergulir, dan penyertaan modal daerah
		900.1.14	Fasilitasi Dana Perimbangan	
			900.1.14.1	Fasilitasi Dana Alokasi Umum Antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar penghitungan, dan rekonsiliasi dana alokasi umum, Sosialisasi dan supervisi dana alokasi umum, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana alokasi umum
			900.1.14.2	Fasilitasi Dana Alokasi Khusus Antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar, Sosialisasi dan supervisi dana alokasi khusus, penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana alokasi khusus, Penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana alokasi khusus
			900.1.14.3	Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam Antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar perhitungan, dan rekonsiliasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Sosialisasi dan supervisi dana bagi

				hasil pajak dan sumber daya alam, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam
			900.1.14.4	Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya Antara lain: Sosialisasi dan supervisi dana otonomi khusus, Sosialisasi dan supervisi dan transfer lainnya, Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan otonomi khusus dan dana transfer lainnya
			900.1.14.5	Dukungan Teknis Fasilitasi Dana Perimbangan Antara lain: Penyiapan sinkronisasi kebijakan dan perimbangan, Penyiapan dukungan teknis dana perimbangan, Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan dana perimbangan
		900.1.15	Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	
			900.1.15.1	Akuntansi Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang akuntansi dan pertangungjawaban keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah
			900.1.15.2	Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah Antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan

				kinerja dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertangungjawaban keuangan daerah
			900.1.15.3	Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertangungjawaban keuangan daerah

			900.1.15.4	Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli Antara lain: Penyiapan bahan bantuan keterangan ahli di bidang keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah
			900.1.15.5	Data Informasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah Antara lain: Penyiapan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan pertangungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan pertangungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, Pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ